



LAPORAN KINERJA 2024

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut ini menggambarkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta sebagai bahan evaluasi dalam rangka peningkatan capaian Kinerja DPMPTSP di masa yang akan datang. Untuk meningkatkan mutu penyajian Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran berikutnya, senantiasa diharapkan saran dan kritik yang membangun serta partisipasi dari semua pihak dalam rangka mendapatkan informasi penilaian kinerja yang akurat dan lebih baik lagi.

Tentunya banyak kekurangan yang terdapat dalam Laporan Kinerja ini sehingga tegur sapa, saran dan masukan kami perlukan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja yang kami sampaikan ini dapat memenuhi kriteria sebagai Laporan Kinerja yang diharapkan oleh pemerintah.

Pelaihari, 17 Januari 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP,




Gentry Yuliyantono, SE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660708 199303 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. (0512) 22323

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 100.3.3/ 001 /DPMPTSP/2024

TENTANG

TIM PEMBENTUKAN PELAKSANA PENERAPAN SAKIP PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut serta guna penataan system manajemen pemerintahan dengan berfokus pada peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome), maka dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi SAKIP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang Pembentukan Tim Pelaksana SAKIP di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang – Undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2023 , tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 110 Tahun 2024, Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 119).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan daftar Aparatur Sipil Negara sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKJ) di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

KEDUA : Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2024 sebagaimana dimaksud didalam Diktum KESATU bertujuan untuk:

1. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja;
2. Melakukan verifikasi dokumen internal penerapan SAKIP di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut;
3. Melakukan evaluasi internal penerapan SAKIP di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut;
4. Melakukan pemantauan dan mengikuti perubahan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dalam rangka penyusunan produk hukum terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pelaihari
Pada Tanggal : 6 Januari 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Tanah Laut,



Gentry Yuliyantono, SE
NIP. 19660708 199303 1 002

Lampiran : Keputusan kepala Dinas
Nomor : 100.3.3/001 /DPMPTSP/2024
Tanggal : 6 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA (LKJ)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024

NO	Nama Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	Kepala SKPD	Penanggung Jawab
2	Sekretaris	Ketua Tim
3	Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4	Kabid Non Perizinan Tertentu	Anggota
5	Kabid Non Perizinan Jasa Usaha	Anggota
6	Kabid Penanaman Modal	Anggota
7	Kabid Data, Informasi dan Pengaduan	Anggota
8	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
9	Kasubbag Keuangan	Anggota

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Tanah Laut,




Gentry Yuliyantono, SE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660708 199303 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Secara umum pencapaian kinerja sasaran dapat memenuhi target sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun terdapat indikator sasaran strategis yang tidak tercapai. Tingkat capaian kinerja yang harus dipertanggungjawabkan melalui indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah 3 (tiga) sasaran strategis yang terdiri atas 2 (dua) sasaran IKU dengan 3 (tiga) indikator.

Berdasarkan hasil uraian pada Bab-Bab dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan ini diketahui bahwa :

1. Hasil evaluasi kinerja ini merupakan hasil evaluasi kinerja dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut, yang dalam hal ini juga berarti bahwa kinerja dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut dengan realisasi fisik 99,87% dan realisasi keuangan 85,10 %, dengan kategori capaian realisasi fisik sangat memuaskan dan realisasi keuangan baik, walaupun dalam beberapa hal masih ada hambatan atau kendala yang harus diperbaiki pada masa mendatang secara berkelanjutan.
2. Realisasi investasi Rp 2.719.130.870.000 (sampai dengan TW IV) dari target Rp 1.568.660.000.000 dengan angka capaian 178%. Nilai IKM yang merupakan sasaran strategis dari IKU yang kedua meraih nilai 91,224 dari target 90,50.
3. Pada Anggaran Murni tahun 2024, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut mengelola Anggaran sebesar Rp. 7.966.271.909 (85,01) yang kemudian anggaran tersebut menjadi meningkat pada APBD Perubahan 2024 menjadi Rp 9.371.235.165,19.
4. Belanja Operasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp 5.936.364.654 (87,22%) dari pagu Rp 6.806.106.89,30.

5. Belanja Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut pada 2024 sebesar Rp 2.029.907.255 (79,13%) dari pagu sebesar Rp 2.565.128.275,89
6. Pada laporan kinerja tahun 2024 ini penyampaian kinerja disampaikan dari level Eselon II, Eselon III, hingga level Eselon IV sehingga penggambaran akuntabilitas kinerja diharapkan dapat tergambar secara lebih jelas per individu pejabatnya sebagai wujud pencapaian Perjanjian Kinerja tiap individu.

Dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditentukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut mengalami beberapa hambatan. Hambatan yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

1. Sarana dan prasarana yang tidak presentatif
2. Terbatasnya sumber daya manusia dan tenaga sebagai pelaksana kegiatan
3. Kurangnya intensifnya koordinasi antar instansi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan

Untuk mengatasi hambatan tersebut di atas diperlukan upaya untuk menanggulangi masalah tersebut, antara lain sebagai berikut

1. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tenaga melalui pendidikan dan pelatihan, seminar dan semacamnya serta penambahan personil melalui peninjauan ulang analisa jabatan
3. Membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi lain untuk mempermudah koordinasi

Demikian yang dapat kami sampaikan sebagai gambaran ringkas pelaksanaan anggaran 2024 dan kinerja DPMPTSP Tanah Laut.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Dasar Hukum	3
D. Cascading Kinerja	4
E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi.....	6
F. Sistematika Penyajian	26
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	28
A. Tujuan Sasaran dan Indikator Kinerja	28
B. Indikator Kinerja Utama	32
C. Perjanjian Kinerja	32
D. Pohon Kinerja	34
E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	37
Bab III Akuntabilitas Kinerja	42
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi	42
1. Sasaran RPD	42
2. Akuntabilitas Kinerja Kepala Dinas	44
2.1 Kepala Bidang Penanaman Modal..	49
2.2 Kepala Bidang Data Informasi dan Pengaduan.....	68
2.3 Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha.....	68
2.4 Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Tertentu	72
3. Akuntabilitas Kinerja Sekretaris	76
3.1 Kepala Sub Bagian Keuangan.....	76
3.2 Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.....	
3.3 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.....	
B. Akuntabilitas Keuangan	120
1. Anggaran dan Realisasi APBD 2024.....	121
2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program	121
3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan 2024	123
Bab IV Penutup	128
A. Kesimpulan	98
B. Strategi Peningkatan Kinerja	130
Lampiran	
1. IKU	
2. Pernyataan Hasil Reviu	
3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 bertanda tangan	
4. Cascading/Pohon Kinerja	

5. Capaian Kinerja Per Triwulan (1-4)
6. Monev Renstra
7. Matrik Keselarasan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai dasar untuk mewujudkan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja (LKj).

Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban dan pertanggungjawaban keberhasilan pelaksanaan visi dan misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Untuk mewujudkan Tujuan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sesuai RPD tahun 2024–2026, tentunya perlu didukung oleh setiap SKPD sesuai dengan bidang dan urusannya, begitu pula dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang merupakan bagian tak terpisahkan guna mendukung keberhasilan RPJMD melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yaitu :

1. Terwujudnya Peningkatan Investasi di Kabupaten Tanah Laut;
2. Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
3. Terwujudnya Peningkatan Tata Kelola Administrasi Perkantoran.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud dari penyusunan LKj Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam satu tahun kepada Bupati Malang.
2. Tujuan Adapun tujuan disusunnya LKj Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuannya.

C. Dasar Hukum

Dasar dalam pembuatan Laporan Kinerja Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Umum di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

D. Cascading kinerja

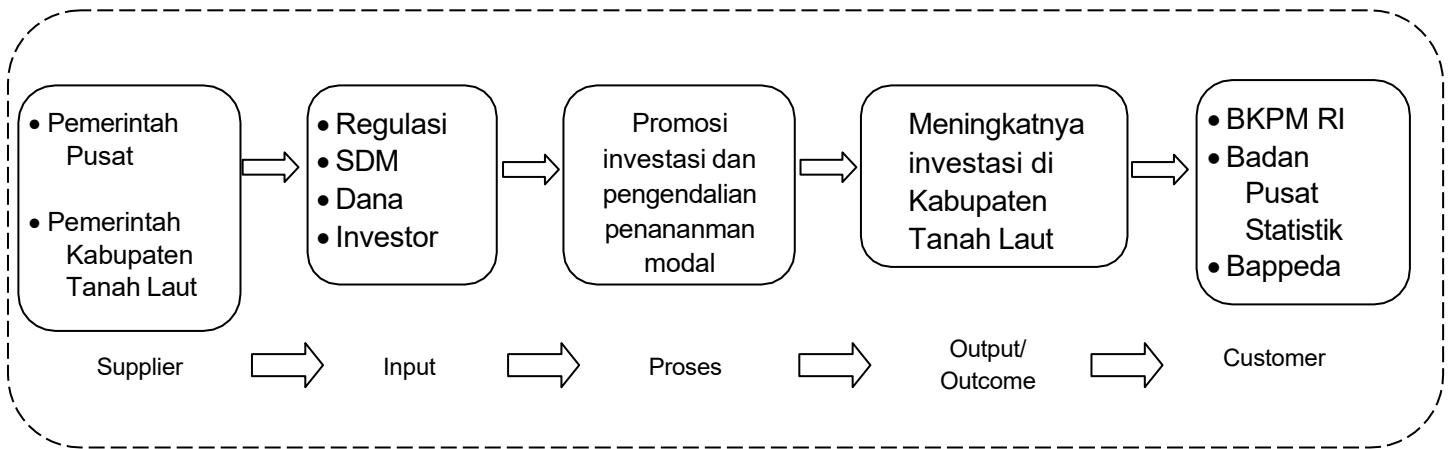
E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Proses Bisnis

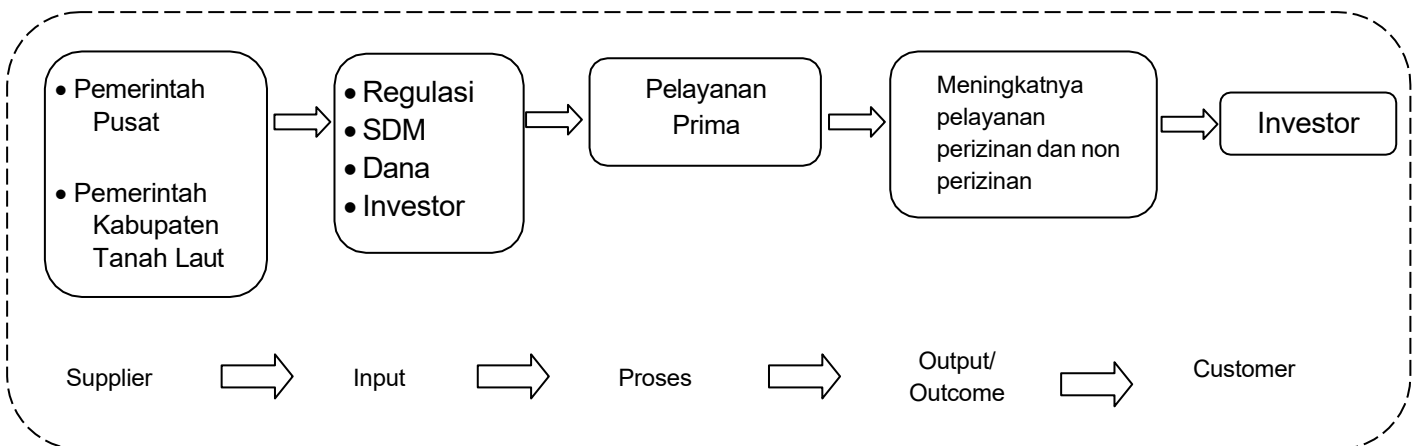
**PROSES BISNIS UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

DPMPPTSP 2. u g a s	MANAJERIAL	PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN KEPEGAWAIAN	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN
	UTAMA	MENINGKATNYA INVESTASI DI KABUPATEN TANAH LAUT	MENINGKATNYA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
	LAINNYA	PENGELOLAAN DATA	PENGENDALIAN MONITORING DAN EVALUASI	FASILITASI DAN KOORDINASI

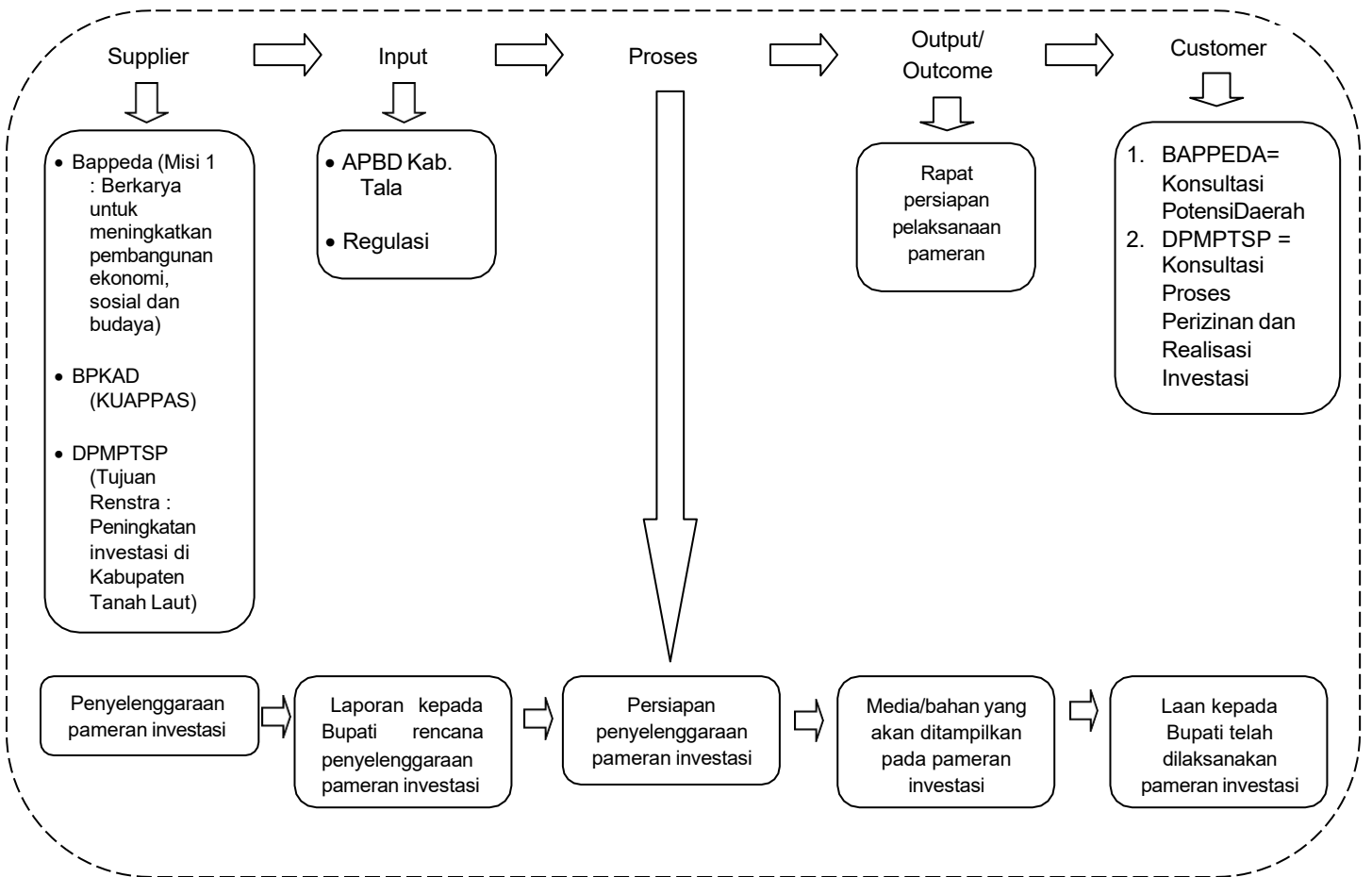
**PROSES BISNIS
MENINGKATNYA INVESTASI DI KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**



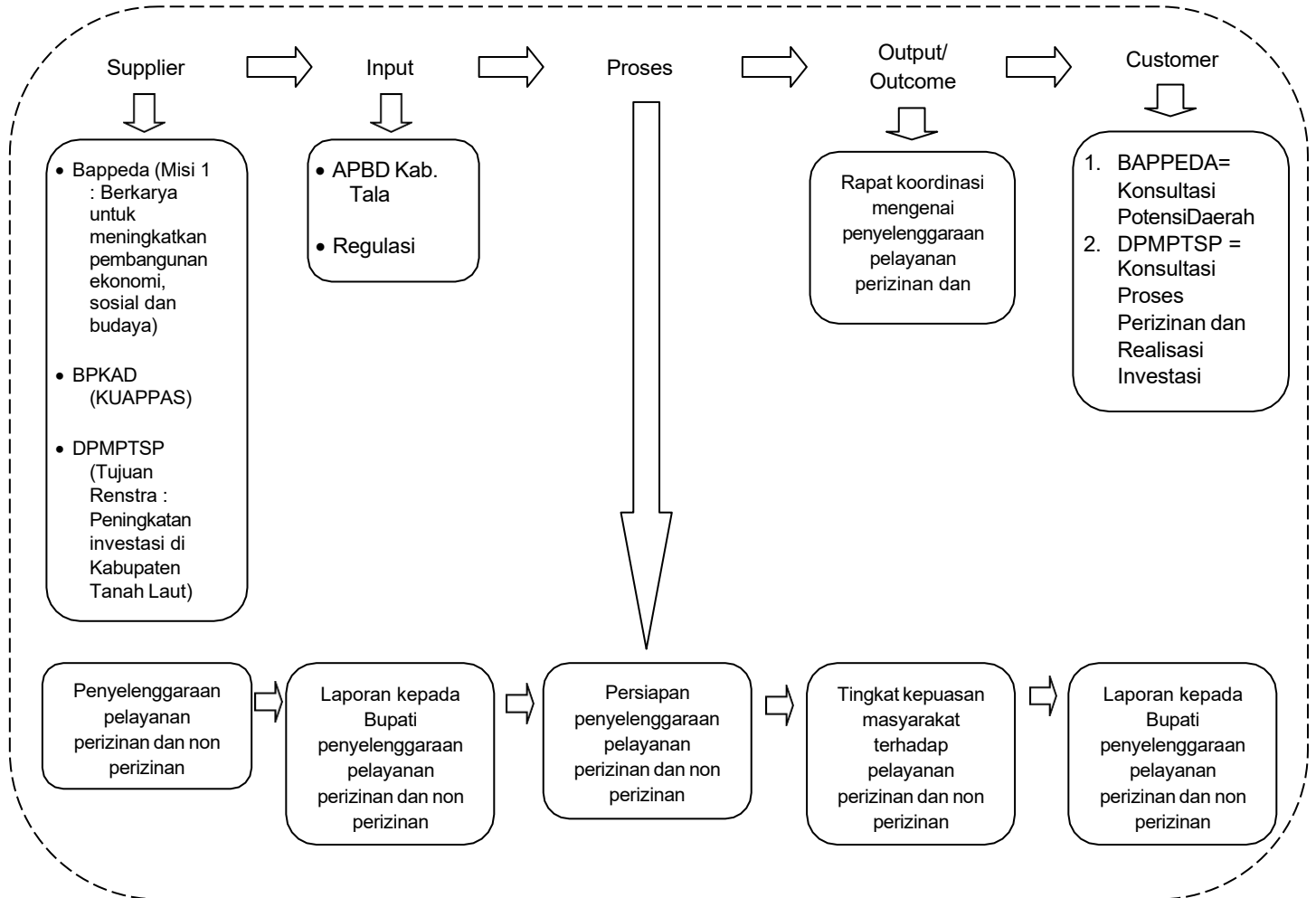
**PROSES BISNIS
MENINGKATNYA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**



**PROSES BISNIS
 BIDANG PENANAMAN MODAL**



**PROSES BISNIS
 BIDANG PELAYANAN PERIZINAN**



2. Fungsi

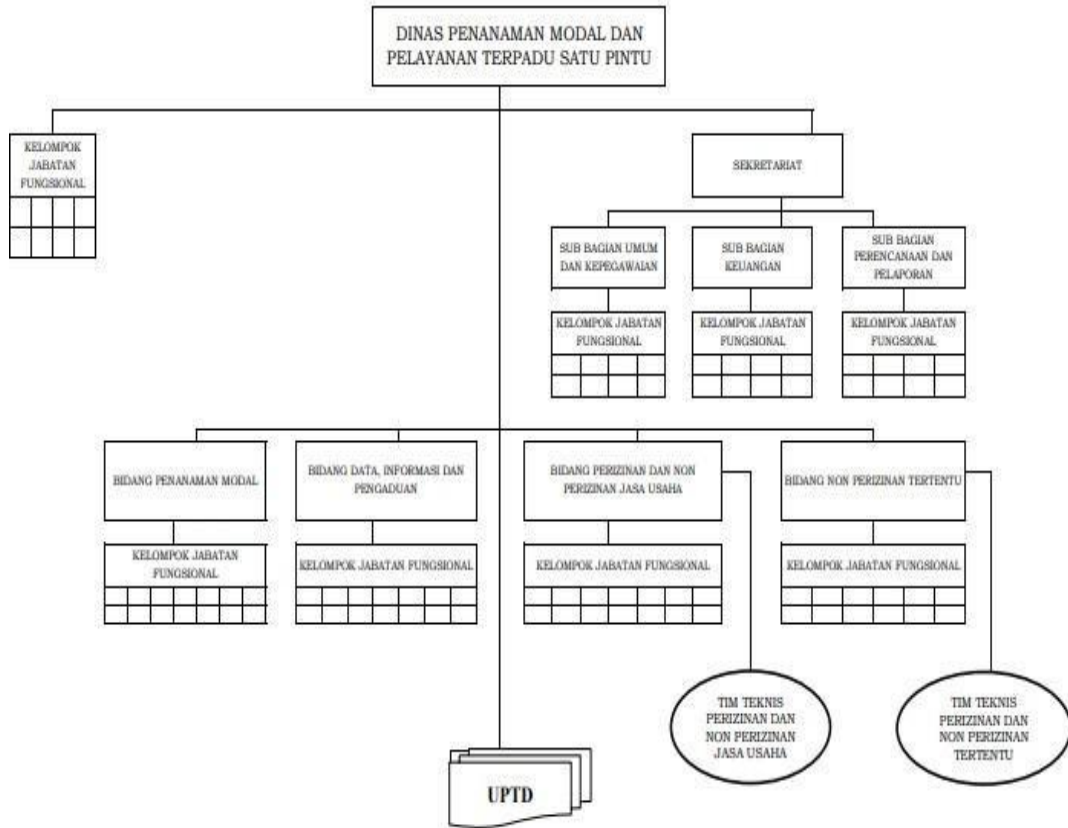
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan bagian dari SKPD di Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut .

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dalam urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.

3. Struktur Organisasi

Adapun Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada bagan beserta uraian tugas sebagai berikut::



BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Dari bagan tersebut dapat dijabarkan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Kasubbag Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Kasubbag Keuangan; dan
 - 3) Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan.
3. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Data, Informasi dan Pengaduan, terdiri dari:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Perizinan dan Nonperizinan Jasa Usaha, terdiri dari:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 2) Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha.
6. Bidang Perizinan dan Nonperizinan Tertentu, terdiri dari:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 2) Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan Tertentu.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kepala Dinas

- (1) Mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal daerah dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penanaman modal daerah dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu

- c. Pelaksanaan administrasi dinas;
- d. Pembinaan UPTD Dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

- (1) Mempunyai mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengoordinasikan penyusunan perencanaan program kerja dan anggaran, administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. Pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - d. Penyiapan Peraturan Perundang-undangan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - e. Penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perlengkapan;
 - f. Pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, perencanaan program kegiatan serta penataan barang;
 - g. Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
 - h. Pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- i. Pengekoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
- j. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Membawahi 3 (Tiga) Sub Bagian Yakni:

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.

(2) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana keuangan dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan keuangan.

(3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran belanja, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas.

Bidang Penanaman Modal

- (1) Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penanaman modal.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan rencana bidang penanaman modal
 - b. Perumusan kebijakan bidang penanaman modal
 - c. Penyusunan perencanaan penanaman modal
 - d. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penanaman modal
 - e. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penanaman modal
 - f. Pelaksanaan kerjasama, promosi dan investasi penanaman modal
 - g. Pelaksanaan pelayanan penanaman modal
 - h. Pelaksanaan pembuatan peta penanaman modal
 - i. Pengembangan peluang dan potensi penanaman modal dalam negeri dan modal asing
 - j. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan penanaman modal
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - l. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Data, Informasi dan Pengaduan

- (1) Mempunyai tugas untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pelayanan data dan informasi serta pengaduan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut bidang Data Informasi dan Pengaduan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja bidang data, informasi dan pengaduan
- b. Perumusan kebijakan bidang data, informasi dan pengaduan
- c. Penyusunan perencanaan pelayanan data, informasi dan pengaduan
- d. Perumusan kebijakan teknis pelayanan data, informasi dan pengaduan
- e. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang data, informasi dan pengaduan
- f. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang data, informasi dan pengaduan
- g. Pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan data dan informasi
- h. Pelaksanaan pengaduan pelayanan
- i. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan data, informasi dan pengaduan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- k. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu di ambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha

- (1) Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perizinan dan nonperizinan jasa usaha.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, perizinan dan nonperizinan jasa usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja bidang pdan nonperizinan jasa usaha
 - b. Perumusan kebijakan bidang perizinan dan nonperizinan jasa usaha

- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang perizinan dan nonperizinan jasa usaha
- d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perizinan dan nonperizinan jasa usaha
- e. Pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan jasa usaha meliputi surat keterangan tempat usaha, izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan, izin usaha peternakan, pendaftaran peternakan rakyat, tanda daftar industri, izin usaha industri, izin usaha perkebunan, izin usaha konstruksi, izin usaha pengelolaan pasar tradisional (IUP2T), izin penangkapan ikan (SIPI), izin usaha pengangkutan ikan (SIKPI), izin usaha perikanan, izin usaha toko modern, izin usaha pusat pembelanjaan, izin praktek dokter hewan, izin penyelenggaraan kursus, izin rumah sakit dan rumah sakit bersalin swasta, izin klinik swasta, izin klinik perusahaan, izin apotek, izin toko obat dan izin lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- f. Penyelenggaraan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan proses penerbitan perizinan dan nonperizinan jasa usaha.
- g. Pengkoordinasian penyelenggaraan penerbitan perizinan dan nonperizinan jasa usaha
- h. Pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perizinan dan nonperizinan jasa usaha
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- j. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya

Bidang Perizinan dan Non Perizinan Tertentu

- (1) Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait pelayanan perizinan tertentu.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Perizinan dan Nonperizinan Tertentu menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja bidang perizinan dan nonperizinan tertentu
 - b. Perumusan kebijakan bidang perizinan dan nonperizinan tertentu
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang perizinan dan nonperizinan tertentu
 - d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perizinan dan nonperizinan tertentu
 - e. Pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan tertentu meliputi izin gangguan (HO), izin mendirikan bangunan/membongkar bangunan, izin hiburan umum, izin reklame, izin usaha perhotelan/penginapan, izin usaha rumah makan/restauran, izin pemanfaatan/pemungutan sarang burung walet, izin usaha perebengkelan, izin usaha kepariwisataan, izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi, izin penggilingan padi dan izin lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - f. Penyelenggaraan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan proses penerbitan perizinan dan nonperizinan tertentu
 - g. Pengkoordinasian penyelenggaraan penerbitan perizinan dan nonperizinan tertentu
 - h. Pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

perizinan dan nonperizinan tertentu

- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- j. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Tim Teknis

- (1) Tim teknis adalah sebuah tim yang terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- (2) Tim Teknis memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan unit pelayanan perizinan terpadu dan kepada Kepala Badan/Dinas yang bersangkutan;
- (3) Tim Teknis terdiri dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.;
- (4) Pelaksanaan Kerja Tim Teknis berada dan ditempatkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Terkait dengan Laporan Kinerja, evaluasi akan dilakukan terhadap jumlah pegawai, serta pendidikan dari sumber daya yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut, untuk melihat apakah sudah diperlukan penambahan SDM, peningkatan pendidikan, atau kursus-kursus/bimtek yang diperlukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut.

4. Isu Strategis

Analisa isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang, di mana apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Isu strategis bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut di 3 (tiga) tahun mendatang. Isu strategis merupakan suatu kondisi/permasalahan yang mempengaruhi langkah dan proses serta menentukan keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi. Terdapat beberapa permasalahan yang masih ditemukan, yaitu:

1. Belum optimalnya penyelenggaraan persyaratan dasar perizinan berusaha di daerah. Masalah ini disebabkan oleh daerah belum menyesuaikan nomenklatur kegiatan perizinan berusaha dalam rangka implementasi sistem *Online Single Submission (OSS)*., belum ditetapkannya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) berbasis digital, serta belum didelegasikannya persetujuan lingkungan oleh Kepala Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut. SDM belum sepenuhnya siap untuk bisa mengimplementasikan penyelenggaraan persyaratan dasar perizinan berusaha di daerah, karena perlu penyesuaian dan peningkatan kapasitas ASN melalui Bimbingan Teknis Sistem *Online Single Submission (OSS)*.
2. Masih belum adanya Mal Pelayanan Publik (MPP)
Salah satu indikator penting terpenuhinya nilai evaluasi kinerja pelayanan publik untuk mendapat nilai A adalah adanya Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Tanah Laut.

5. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut memiliki pegawai sebanyak 16 (enam belas) orang. Dari jumlah pegawai sebanyak 16 (enam belas) orang tersebut, terdiri dari Kepala Dinas (Pimpinan Tinggi Pratama) sebanyak 1 (satu) orang, Sekretaris (Pejabat Administrator) sebanyak 1 (satu) orang, Kepala Bidang (Pejabat Administrator) sebanyak 4 (empat) orang, Kepala Sub Bagian 3 (tiga) orang, serta staf pelaksana sebanyak 7 (tujuh) orang. Lebih lanjut tentang komposisi kepegawaian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1. Komposisi Kepegawaian Berdasarkan Esselon Jabatan

No.	Uraian	Esselon II	Esselon III	Esselon IV	Staf	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1	-	-	-	1
2.	Sekretaris	-	1	-	-	1
3.	Kepala Bidang	-	4	-	-	4
4.	Kepala Sub Bagian	-	-	3	-	3
5.	Staf Pelaksana	-	-	-	7	7
	JUMLAH	1	5	3	7	16

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Esselon III menempati jumlah terbanyak di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut sebanyak 5 (lima) orang, diikuti esselon IV sebanyak 3 (tiga) orang dengan 1 (satu) orang Plt, esselon II sebanyak 1 (satu) orang serta ditambah Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 14 (empat belas) orang. Untuk menunjang efektivitas kinerja, pemetaan terhadap pendidikan yang ditamatkan oleh pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut dikelompokkan berdasarkan jenjang pendidikan. Hasil pemetaan pendidikan pegawai Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel 1.2. sebagai berikut:

Tabel 1.2. Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan

No.	Uraian	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	Jumlah
1.	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	1
2.	Sekretaris	1	-	-	-	-	1
3.	Kepala Bidang	2	2	-	-	-	4
4.	Kepala Sub Bagian	1	1	1	-	-	3
5.	Staf	-	5	1	1	-	7
	JUMLAH	4	9	2	1	0	16

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dari seluruh pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut, jumlah terbanyak 9 (sembilan) orang berlatar pendidikan Strata 1 setelah itu disusul oleh pegawai berpendidikan Diploma 3 sebanyak 1 (satu) orang dan SLTA masing- masing 1 (satu) orang, kemudian terakhir sebanyak 4 (empat) orang pegawai yang berlatar pendidikan Strata 2.

Selain dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) serta Sarana dan Prasarana, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2024 mendapat anggaran sebesar Rp. 9.371.235.165,19,-

Sedangkan kondisi sarana prasarana yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel Rekapitulasi Barang Milik Daerah Aset Tetap dan Aset Lainnya (Intrakomptabel) per 31 Desember 2024

No	Nama Golongan Aset	Volume	Nilai Perolehan	Ket
1	Tanah	- Persil	0	
2	Peralatan dan Mesin	357 Item	Rp. 2.890.644.484,45	
3	Gedung dan Bangunan	6 Unit	Rp. 1.587.945.932,60	
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	- Unit	0	
5	Aset Tetap Lainnya	- Item	0	
6	Aset Tidak Berwujud	13 Item	Rp. 521.868.779,52	
	Jumlah	376	Rp. 5.000.459.196,57	

6. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD Nomor 700.1.2.1/066/LHE-AKIP-Irban III/Insp/2024 tanggal 1 April 2024, bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut memperoleh nilai SAKIP untuk Laporan Kinerja Tahun 2023 adalah dengan nilai 78,65 dengan predikat “BB” Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Sangat Baik”, yaitu Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki system kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level eselon 3/coordinator.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

Komponen yang di nilai	Bobot	Nilai atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	
		2023	2024
a. Perencanaan Kinerja	30	24	23.70
b. Pengukuran Kinerja	30	24	24.60
c. Pelaporan Kinerja	15	12	11.10
d. Evaluasi Internal	25	20	19.25
Nilai Hasil Evaluasi	100	80	78.65
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Dari LHE tersebut ada beberapa rekomendasi yang disampaikan untuk ditindak lanjuti guna perbaikan laporan kinerja kedepannya.

Rekomendasi dan tindak lanjut hasil rekomendasi tersebut sebagaimana diuraikan dalam tabel dibawah ini :

No.	KOMPONEN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
a.	Perencanaan Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam penyusunan perencanaan kinerja agar mempedomani laporan kinerja tahun sebelumnya dan hasil monitoring evaluasi tahun berjalan. 2. Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja agar pimpinan memberikan umpan balik (feedback) yang jelas dan terarah. 3. Dalam setiap dokumen perencanaan kinerja agar dapay memperhatikan keselarasan indicator kinerja dan target. 4. Agar kedepannya lebih memperhatikan penetapan target yang sesuai dengan indicator. 	Perbaikan dan penyempurnaan dalam pembuatan dokumen perencanaan telah dilaksanakan sebagaimana rekomendasi hasil evaluasi AKIP

No.	KOMPONEN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
b.	Pengukuran Kinerja:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agar penyesuaian strategis, kebijakan dan perubahan anggaran dibahas/terdokumentasi secara rinci dalam laporan monitoring evaluasi berkala (pertriwulan). 2. Dalam melakukan perubahan Renja, agar berdasarkan hasil analisis pengukuran kinerja berkala (monev per triwulan) dan laporan kinerja tahun sebelumnya. 3. Setiap pegawai telah menetapkan sasaran kinerja (SKP) berdasarkan kinerja yang diperjanjikan (PK) pada SKP feedback pimpinan terhadap hasil capaian kinerja agar menyajikan umpan balik yang terarah dan berkelanjutan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah memenuhi pelaporan dalam laporan monitoring evaluasi berkala (pertriwulan) beserta dokumentasinya 2. Telah disesuaikan hasil analisis pengukuran kinerja berkala (monev per triwulan) dan laporan kinerja tahun sebelumnya. 3. Telah disesuaikan setiap pegawai telah menetapkan sasaran kinerja (SKP) berdasarkan kinerja yang diperjanjikan (PK)
c.	Pelaporan Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan kinerja berkala (Monev per triwulan) yang disusun agar digunakan dalam penyesuaian aktivitas dan anggaran 2. Laporan kinerja yang disusun agar digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya. 3. Agar didalam Laporan Kinerja dan data capaian triwulan ditambahkan informasi yang cukup memadai dan sumber data yang akurat tentang pencapaian target serta dokumentasi yang relevan untuk masing masing indicator sasaran. 4. Agar didalam laporan kinerja ditambahkan tabel perbandingan dan analisa antara terget dan realisasi setiap indikator dan target beberapa tahun sebelumnya (jika sudah ada realisasi nya) agar lebih informatif. 5. Agar dilakukan reвью berjenjang atas laporan kinerja tahunan dan data capaian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah disesuaikan pada laporan kinerja berkala pertriwulan sesuai aktivitas anggaran 2. Perencanaan kinerja telah disesuaikan dengan Pohon kinerja yang telah divalidasi 3. Telah menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi internal atas capaian kinerja terhadap Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang dilaksanakan secara berkala (bulanan maupun triwulan) 4. Akan menambahkan tabel perbandingan dan Analisa antara target 5. Telah menindaklanjuti dan mendokumentasikan apa yang menjadi rekomendasi dari hasil

		triwulan yang dibuat sehingga informasi yang disajikan lebih berkualitas, tidak hanya sekedar pemenuhan dokumen tetapi nyata dilaksanakan sehingga menjadi perhatian pimpinan dan kepedulian seluruh pegawai.	evaluasi AKIP yang diberikan oleh APIP
d.	Evaluasi akuntabilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agar segera menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil evaluasi internal tahun 2023 dengan menyusun rencana aksi tindak lanjut. 2. Agar menyampaikan laporan monitoring evaluasi per triwulan tahun 2024 kepada Inspektur Kabupaten Tanah Laut. 	Monitoring dan evaluasi internal atas capaian kinerja terhadap Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkala (bulanan maupun triwulan)

F. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 berpedoman pada Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 000.8.6/ 3655 /ORG/2024 tanggal 9 Desember 2024 perihal Penyampaian Laporan Kinerja (LKj) SKPD , sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Dasar Hukum
- D. Cascading Kinera
- E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi
- F. Isu Strategis Perangkat Daerah
- G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran
- H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun sebelumnya

I. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- C. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi
 - 1. Sasaran RPJMD
 - 2. Esselon II
 - 3. Esselon III
- B. Akuntabilitas Keuangan
 - 1. Anggaran dan Realisasi APBD 2024
 - 2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program
 - 3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan 2024

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Strategi Peningkatan Kerja

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1. IKU
- 2. Pernyataan Hasil Reviu
- 3. Pernyataan Perjanjian Kinerja 2021
- 4. Cascading / Pohon Kinerja
- 5. Capaian Per Triwulan (1-4)
- 6. Monev Renstra
- 7. Matrik Keselarasan

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

1. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan sebuah misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu. Adanya tujuan yang ditetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut akan memudahkan bagi organisasi untuk mencapai kinerja yang diinginkan karena telah ditetapkan tujuan apa yang akan di capai sesuai dengan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah disepakati. Adapun tujuan yang mau di capai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam kurun waktu 2024 – 2026 yaitu :

- 1) Meningkatkan Investasi Daerah
- 2) Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari pemerintah
- 3) Meningkatnya Kinerja Tata Kelola DPMPTSP

2. Sasaran

Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan organisasi. Penjabaran dari tujuan secara spesifik dan terukur dirumuskan lebih lanjut kedalam sasaran. Oleh karena itu sasaran

harus terinci dan terukur. Adapun yang menjadi sasaran dari tujuan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut sebagai berikut :

- 1) Nilai realisasi Investasi Daerah
- 2) Indeks Kepuasan Masyarakat
- 3) Nilai SAKIP DPMPTSP

Sasaran strategis yang telah dirumuskan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut sebagaimana sasaran rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Formulir Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya realisasi investasi daerah	Nilai Realisasi Investasi	1.568.663.53
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat terhadap Perizinan dan Non Perizinan	Indeks kepuasan Masyarakat	90.50
3.	Meningkatnya kinerja tata Kelola DPMPTSP	Nilai SAKIP DPMPTSP	82.00

Berikut diperlihatkan tabel tujuan, indikator, target, sasaran, indikator dan target 3 Tahun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut:

Tabel 2.2 Tujuan, Indikator, Target, Sasaran, Indikator, Target 3 Tahun

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Baseline Tujuan/Sasaran PD		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
				Realisasi	Proyeksi	2024	2025	2026
				2022	2023			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Investasi Daerah		Persentase Pertumbuhan					
			Investasi Daerah					
		Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi Daerah	1,422,824	1,493,965	1,568,663.53	1,647,096.70	1,729,451.54
2	Meningkatkan Kepuasan		Indeks Pelayanan Publik					
	masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari pemerintah	1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat terhadap Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	89.47	90.00	90.50	90.75	91.00
3	Meningkatkan Akuntabilitas		Nilai SAKIP Kabupaten	B	69.00	70.01	75.00	80.01

LKjIP DPMPTSP TANAH LAUT Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Baseline Tujuan/Sasaran PD		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
				Realisasi	Proyeksi	2024	2025	2026
				2022	2023			
	Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya Kinerja Tata						
		1 Meningkatkan Kinerja Tata	Nilai SAKIP DPMPTSP	Dalam	80.01	82.00	83.00	85.00
		Kelola DPMPTSP		Penilaian				

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama akan dapat memberikan gambaran suatu ukuran keberhasilan Instansi Pemerintah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama

No.	Kinerja Utama/ <i>Outcome</i> / Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggung jawab/Sumber Data
1	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Realisasi Investasi	Angka Realisasi investasi	DPMPTSP
2	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat terhadap terhadap perizinan dan non perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey	DPMPTSP

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Sebagai instansi pemerintah kabupaten Tanah Laut maka DPMPTSP juga membuat perjanjian kinerja untuk tahun anggaran 2024. Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh para pihak terkait. Ketentuan penandatanganan Perjanjian Kinerja ini diatur sebagai berikut :

1. Perjanjian Kinerja Pimpinan Satuan Kinerja Pemerintah Daerah (SKPD) dengan tingkat Esselon II, disusun oleh pimpinan SKPD yang kemudian ditandatangani oleh Bupati (Terlampir).
2. Selain antara pimpinan SKPD dengan Bupati, DPMPTSP juga melakukan penyusunan Perjanjian Kinerja antara Sekretaris/ Kepala Bidang (Eselon III) dengan Pimpinan SKPD, serta Kepala Sub Bagian (Eselon IV) dengan Sekretaris/Kepala Bidang (Eselon III) untuk menyajikan indikator kinerja utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya. Rincian perjanjian kinerja Eselon II, Eselon III dan Eselon IV, serta Pelaksana sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 sebagaimana terlampir. Tabel Perjanjian Kinerja SKPD DPMPTSP adalah sebagai berikut :

TABEL 2.4 PERJANJIAN KINERJA

KEPALA DINAS		
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Nilai Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	1.568.663,53
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat terhadap Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	90.50
Meningkatnya kinerja tata kelola DPMPTSP	Nilai SAKIP DPMPTSP	82
SEKRETARIS		
Meningkatnya kinerja tata kelola Perangkat daerah yang akuntabel	Nilai komponen perencanaan	90
	Nilai komponen pengukuran	90
	Nilai komponen pelaporan	90
	Nilai komponen evaluasi internal	90
	Hasil Survey Pelayanan Kesekertariatian	90
KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL		
Meningkatnya realisasi investasi daerah (dalam juta)	1.568.663.53	2.719.130,87
KEPALA BIDANG DATA,INFORMASI DAN PENGADUAN		
Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan dan non perizinan	Presentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100
Tervalidasinya data dan informasi Pelayanan perizinan dan non perizinan	Presentase data dan informasi yang valid	4
KEPALA BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TERTENTU		
Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan dan non perizinan	Presentase Rekomendasi teknis SKPD Sesuai dengan ketentuan	100
KEPALA BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN JASA USAHA		
Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan dan non perizinan	Presentase Rekomendasi teknis SKPD Sesuai dengan ketentuan	100
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN		

Meningkatnya Kualitas dokumen pelaporan linkup perangkat daerah	Presentase dokumen pelaporan perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN		
Meningkatnya ketaatan penyusunan dokumen	Presentase Dokumen Perencanaan yang tersusun tepat waktu	100
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN		
- Meningkatkan kualitas layanan kepegawaian perangkat daerah	- Presentase ASN yang terlayani kepegawaianya dengan baik	100
- Meningkatkan kepatuhan perangkat daerah menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP	- Presentase rekomendasi hasil evaluasi AKIP yang ditindaklanjuti	100
	- Presentase rekomendasi hasil evaluasi ZI yang ditindaklanjuti	100
	- Presentase layanan administrasi umum sesuai SOP	100
- Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang kinerja perangkat daerah	- Presentase aset dalam kondisi baik	100
- Terpenuhinya layanan administrasi umum perkantoran	- Presentase layanan administrasi umum sesuai SOP	100
- Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang kinerja perangkat daerah	- Presentase dalam kondisi baik	100

D. Pohon Kinerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu





Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Gentry Yuliantono, SE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660708 199303 1 002

E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Dalam mendukung visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut sebagaimana yang dijabarkan dalam sasaran strategis maka untuk mencapai sasaran tersebut perlu didukung dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

A. Urusan Wajib Bidang Penanaman Modal

Tabel 2.4
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Wajib Bidang Penanaman Modal

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	- Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	39.948.275
2.	Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	- Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	449.999.429
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	- Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	42.820.458
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	- Pengawasan Penanaman Modal - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	- 86.633.512 - 158.830.980 - 43.316.498

B. Urusan Wajib Bidang Perizinan dan Non Perizinan Tertentu

Tabel 2.5
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Wajib Bidang Perizinan dan Non Perizinan Tertentu

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	119.968.800

C. Urusan Wajib Bidang Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha

Tabel 2.6
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Wajib Bidang Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha

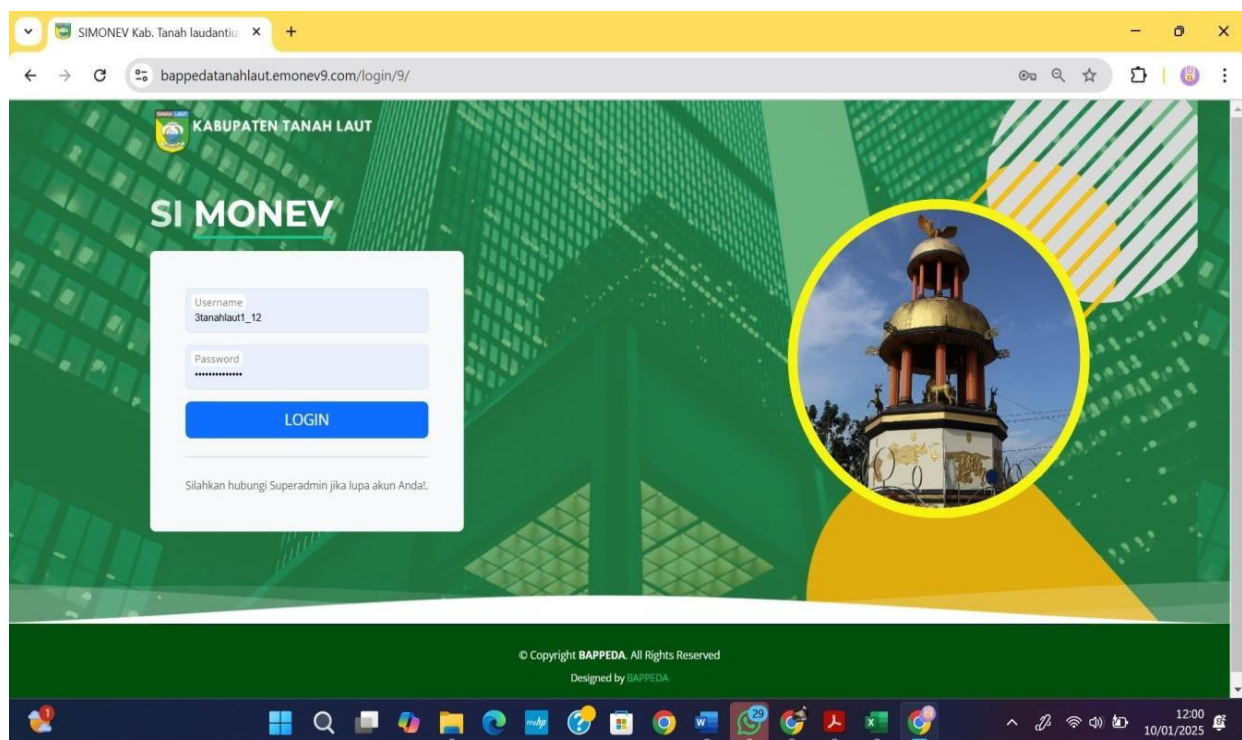
No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	119.968.800

D. Urusan Wajib Bidang Data Informasi dan Pengaduan

Tabel 2.7
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Wajib Bidang Data informasi dan Pengaduan

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasisrisiko	34.988.966
No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
2.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan BerbasisSistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	190.181.992

Dan Salah satu Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah aplikasi Monev (Monitoring dan evaluasi) per triwulan.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

1. Sasaran RPD

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Renstra yang telah dibuat untuk tahun 2024-2026 telah menetapkan beberapa sasaran strategis. Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut untuk tahun anggaran 2024 adalah Laporan Kinerja Dinas pelaksanaan RPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Tanah Laut. Sesuai dengan keadaan, RPD dibuat untuk setiap sasaran dapat lebih dari satu indikator kinerja sasaran di mana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan indikator kinerja yang akan dapat mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 sesuai sasaran strategis yang akan diketahui keberadaannya.

Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut dengan menetapkan kategori pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengelompokkan Capaian Kinerja

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	> 90%	Sangat Memuaskan
II	81% - 90%	Memuaskan
III	71% - 80%	Sangat Baik
IV	61% - 70%	Baik
V	51% - 60%	Cukup
VI	< 50%	Kurang

Berikut di bawah ini tabel realisasi capaian sasaran strategis:

Tabel 3.2
Realisasi Capaian Sasaran Strategis RPJMD Tahun 2024
Dinas Penanaman Modal dan PSTP Kabupaten Tanah Laut

No .	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Persentase Capaian Tahun 2024	Keterangan
1	Meningkatnya realisasi investasi Daerah	Nilai realisasi investasi daerah	1.492,18	1.568.663,53	2.719.130,87	173%	Sampai dengan TW IV
2	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat terhadap perizinan dan non Perizinan	Indeks kepuasan masyarakat	89,52	90,50	91,224	101%	Sangat Memuaskan
3	Meningkatnya kinerja tata Kelola DPMPTSP	Nilai SAKIP DPMPTSP	78,65	82,00	Masih dalam proses penilaian	-	-

1.1 Analisa Capaian Sasaran Strategis SKPD

Hasil penghitungan persentase rata-rata capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2024 adalah 99,87% dengan kategori capaian Sangat Memuaskan. Meskipun demikian, ada beberapa hal terkait hambatan atau kendala yang harus dapat teratasi pada tahun-tahun mendatang secara terus-menerus dan konsisten.

2. Akuntabilitas Kinerja Kepala Dinas

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut dalam Perjanjian Kinerja (PK) terdiri dari 2 (dua) kinerja utama, yaitu Meningkatnya Investasi di Kabupaten Tanah Laut (1) dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat terhadap Perizinan dan Non Perizinan (2), sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3

Kinerja Utama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian
1	Meningkatnya Investasi di Kabupaten Tanah Laut	Tingkat Investasi Daerah	1.568.663,53	2.719.130,87
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat terhadap Perizinan dan Non Perizinan	Tingkat kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	90.50	91,224
3	Meningkatnya kinerja tata kelola DPMPPTSP	Nilai SAKIP DPMPPTSP	82	Masih dalam proses penilaian

2.1. Analisa Capaian Kinerja Utama Eselon II

Berdasarkan tabel 3.3 mengenai target Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024, maka dapat dibuat tabel 3.4 mengenai Capaian Indikator Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dan 2024 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dan 2024

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2024			
			Realisasi 2023	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi Daerah	1.492,18	1,568,663.53	2.719.130,87	178%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat terhadap Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,52	90.50	91,224	100%
3	Meningkatnya kinerja tata kelola DPMPTSP	Nilai SAKIP DPMPTSP	78,65	82	Masih dalam proses penilaian	

- Analisa Perbandingan Realisasi dengan Target

Secara garis besar kinerja pelayanan SKPD didasarkan pada kualitas layanan, yang diukur keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Utama pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik yakni Nilai Realisasi Investasi Daerah dan indeks kepuasan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut.

Menurut data yang dihimpun dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, realisasi investasi Kabupaten Tanah Laut pada triwulan IV mencapai 78% yakni Rp 2.719.130.870.000 (178%) dari target yang ditentukan sebanyak Rp 1.568.660.000 Sedangkan untuk pelayanan publik yang diselenggarakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut, selain diukur melalui survey kepuasan masyarakat juga diukur melalui pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Gambar 3.5

Survey Kepuasan Masyarakat

Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,63	3,66	3,47	3,98	3,62	3,65	3,57	3,65	3,63
Kategori	A	A	B	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	91,224 (A atau Sangat Baik)								

Gambar 3.2 Realisasi Investasi Provinsi Kalimantan Selatan

**REALISASI INVESTASI KALSEL JAN S/D SEPT
TAHUN 2024 BERDASARKAN KAB/ KOTA**

Kabkot	PMDN		PMA			PMDN+PMA	
	pmdn_proyek	pmdn_tambahan_juta	pma_proyek	pma_tambahanusd_ribu	pma_tambahan_juta	total_proyek	total_tambahan_juta
Kabupaten Kotabaru	362	Rp 910.437,40	121	\$ 246.665,10	Rp 3.699.977,77	483	Rp 4.610.415,17
Kabupaten Tanah Bumbu	908	Rp 2.781.408,40	70	\$ 62.185,30	Rp 932.779,96	978	Rp 3.714.188,36
Kota Banjarmasin	1894	Rp 2.973.888,40	162	\$ 8.411,30	Rp 126.169,56	2.056	Rp 3.100.057,96
Kabupaten Tapin	356	Rp 1.618.639,20	10	\$ 4.627,80	Rp 69.417,05	366	Rp 1.688.056,25
Kabupaten Banjar	1152	Rp 1.204.451,70	168	\$ 2.397,20	Rp 35.958,03	1.320	Rp 1.240.409,73
Kabupaten Tanah Laut	469	Rp 904.684,40	129	\$ 21.076,90	Rp 316.153,75	598	Rp 1.220.838,15
Kabupaten Tabalong	949	Rp 684.820,70	75	\$ 13.056,50	Rp 195.847,66	1.024	Rp 880.668,36
Kabupaten Balangan	479	Rp 296.144,20	9	\$ 23.766,30	Rp 356.494,52	488	Rp 652.638,72
Kota Banjar Baru	1012	Rp 227.279,50	84	\$ 10.794,30	Rp 161.914,51	1.096	Rp 389.194,01
Kabupaten Hulu Sungai Selatan	161	Rp 322.522,90	-	\$ -	Rp -	161	Rp 322.522,90
Kabupaten Hulu Sungai Tengah	272	Rp 182.108,20	13	\$ 31,70	Rp 475,50	285	Rp 182.583,70
Kabupaten Barito Kuala	151	Rp 75.362,70	43	\$ 3.643,50	Rp 54.652,57	194	Rp 130.015,27
Kabupaten Hulu Sungai Utara	90	Rp 2.993,80	-	\$ -	Rp -	90	Rp 2.993,80
TOTAL	8255	Rp 12.184.742	884	\$ 396.655,90	Rp 5.949.840,88	9139	Rp 18.134.582,38

Sumber data: Badan Koordinasi Penanaman Modal

- Analisa Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Pada tahun 2024 realisasi investasi pada triwulan IV mencapai 178% dari atau sebesar Rp. 2.719.130.870.000 dari target sebesar 1.568.660,000 dibandingkan dengan n-1 yakni 2023 yang mencapai Rp 1.492.187.790 dari target yang ditetapkan yaitu Rp 1.027.336.000,00 dengan capaian 145%.

Tabel 3.6

TARGET DAN REALISASI INVESTASI

TAHUN	TARGET	REALISASI	Persen (%)
2021	931.824.000.000	773.620.960.000	83%
2022	978.415.000.000	1.588.807.660.000	162%
2023	1.027.336.000.000	1.492.187.790.000	145%
2024	1.568.660.000.000	2.719.130.870.000	178%

Sumber data: Badan Koordinasi Penanaman Modal

Realisasi investasi triwulan IV tahun 2024 belum tersedia disebabkan bahwa Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dari pelaku usaha disampaikan melalui sistem Online Single Submission (OSS) adalah pada

bulan Januari 2025. Rekapitulasi realisasi investasi tahun 2024 akan dikeluarkan secara resmi oleh BKPM/ Kementerian Investasi dan Hilirisasi pada bulan Februari 2025.



2.1.1 Kepala Bidang Penanaman Modal

Tabel 3.9
Hasil Capaian Realisasi Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya realisasi investasi daerah	1.568.663.53	2.719.130,87	178 %

Selanjutnya tabel berikut menyajikan perbandingan kinerja tahun 2024 dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.10
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah investor yang berinvestasi	100%	25 pelaku usaha	25 pelaku usaha	100%
2	Jumlah investor yang berinvestasi	100%	100 investor	100 investor	100%
3	Persentase hasil rekomendasi pengawasan, pemantauan dan permasalahan dan hambatan yang di tindaklanjuti	100%	100%	100%	100%

4	Persentase perusahaan yang melaporkan LKPM	100%	20%	20%	100%
---	--	------	-----	-----	------

- Analisa Perbandingan Realisasi dengan Target

Pada tahun 2024 Kepala Bidang Penanaman Modal berhasil mencapai 100% dari target kinerja seperti sasaran program pertama meningkatnya pengembangan iklim penanaman modal yang kondusif ditargetkan 25 pelaku usaha tercapai sasaran program kedua meningkatnya pengembangan iklim penanaman modal yang kondusif yang ditargetkan 100 investor tercapai 100%. Sasaran ketiga yakni meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal tercapai 100% dari target. Sasaran keempat yaitu meningkatnya kualitas pengendalian penanaman modal yang sumber pendanaan berasal dari DAK non fisik yang juga berhasil dilaksanakan 100%

- Analisa Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Pada tahun 2024 Bidang Penanaman Modal sasaran pertama meningkatnya pengembangan iklim penanaman modal pada sub kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota dengan target 1 dokumen terealisasi 100%, sasaran kedua meningkatnya pengembangan iklim penanaman modal pada sub kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota target 5 dokumen terealisasi 100%. Sasaran ketiga yaitu meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan pada sub kegiatan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko target 25 kegiatan usaha terealisasi 100% sama seperti tahun sebelumnya. Kemudian sasaran keempat yakni Meningkatkan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal pada sub kegiatan penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam meralisasikan kegiatan usahanya target 5 kegiatan usaha terealisasi 100%, sub kegiatan bimbingan teknis kepada pelaku usaha target 134 pelaku usaha terealisasi

100% dan sub kegiatan pengawasan penanaman modal target 8 kegiatan usaha terealisasi 100% sama seperti tahun sebelumnya terealisasi 100%.

▪ Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

- Jumlah Investor yang berinvestasi
Persentase pelaku usaha sub kegiatan penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota. Adanya buku peta potensi untuk meningkatkan minat pelaku usaha. Persentase pelaku usaha merupakan program pengembangan iklim penanaman modal terdiri dari kegiatan pembuatan buku peta potensi investasi di Tanah Laut. Sub kegiatan penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota target 1 dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen sehingga berhasil di capai 100%.

- Jumlah Investor yang berinvestasi

Persentase promosi penanaman modal merupakan program promosi penanaman modal. Program promosi penanaman modal yang terdiri dari kegiatan pameran untuk meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Tanah Laut berhasil dicapai 100%.

- Persentase hasil rekomendasi pengawasan, pemantauan dan permasalahan dan hambatan yang di tindaklanjuti

Program pelayanan penanaman modal diampu oleh 4 bidang sekaligus, untuk bidang penanaman modal melaksanakan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yakni pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal. Indikator kinerja nya jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal berupa jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melaporkan rekapitulasi penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang ditargetkan 100 kegiatan usaha laporan dan terealisasi sebanyak

100 kegiatan usaha berhasil dicapai 100%.

- Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mencapai 100% pada tahun 2024. Pada program pengendalian pelaksanaan penanaman modal ini melaksanakan bimbingan teknis pada 134 pelaku usaha dan pengawasan untuk menilai kepatuhan perizinan berusaha pelaku usaha serta penyelesaian permasalahan dan hambatan yang di hadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya.

- a. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kerja

1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

2) Program Promosi Penanaman Modal

- Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

3) Program Pelayanan Penanaman Modal

- Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

1. Program pengembangan iklim penanaman modal

Pelaksanaan program pengembangan iklim penanaman modal terlaksana 100% secara fisik, realisasi keuangan sebesar Rp 39.276.275 atau 98,32% dari anggaran sebanyak Rp 39.948.275,- Terdapat efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 672.000

2. Program Promosi Penanaman Modal

Pelaksanaan program promosi penanaman modal terlaksana 100% secara fisik, realisasi keuangan sebesar Rp. 529.882.362 atau 99,49% dari anggaran sebanyak Rp. 532.621.740,- terdapat efisiensi sisa anggaran sebesar Rp. 2.739.378.

3. Program Pelayanan Penanaman modal

Dalam program pelayanan penanaman modal ada 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan yang di ampu oleh 3 bidang. Bidang Penanaman modal mengampu sub kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko yang pada pelaksanaannya terealisasi 100% secara fisik dan realisasi keuangan sebesar Rp. 42.679.780 atau 99,67% terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 140.678,-.

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di danai melalui DAK non Fisik yang dalam pelaksanaan fisiknya terealisasi sebesar 100%. Realisasi keuangan untuk program tersebut sebesar Rp. 277.856.645 atau 96,22% dari pagu anggaran sebesar Rp. 288.780.990.

▪ Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang ada pada Bidang Penanaman Modal tahun 2024 sebanyak 2 orang PNS yang terdiri dari 1 orang Kabid Penanaman Modal, 1 orang staf pelaksana. Selain itu juga didukung oleh 2 orang tenaga kontrak yang terdiri dari 1 orang PTT dan 1 tenaga pendamping DAK. Keberhasilan capaian program pada Bidang Penanaman Modal didukung oleh beberapa faktor penting dalam pencapaiannya. Keberhasilan bidang penanaman modal dalam melaksanakan tugas selain dipengaruhi oleh kualitas SDM yang tersedia pada bidang yang bersangkutan juga didukung oleh anggota tim teknis

yang terdiri dari seluruh pegawai yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Rencana Aksi Anggaran dan Kinerja
 1. Diperlukan penguatan kapasitas dalam bentuk bimbingan teknis/ diklat.
 2. Diperlukan bimbingan teknis terkait pengawasan untuk lintas SKPD terkait
 3. Lebih terkoordinasi tentang penyelesaian permasalahan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.
 4. Adanya penambahan tenaga pemantau kegiatan penanaman modal.
 5. Waktu pelaksanaan penyusunan peta potensi diperpanjang.

- Kendala dan Perbaikan Ke depannya

Kendala yang dihadapi oleh Bidang Penanaman Modal, di antaranya:

1. Keterbatasan SDM DPMPTSP dalam penguasaan Materi Perizinan dan Pengawasan Berbasis Risiko pada Online Single Submission (OSS).
2. Sistem pengawasan dalam OSS tidak terlalu dipahami oleh stake holder dan pelaku usaha.
3. Permasalahan yang di hadapi pelaku usaha lebih banyak pada masalah ketenagakerjaan.
4. Tidak semua usaha mikro dapat di promosikan.
5. Keterbatasan tenaga pemantau laporan kegiatan penanaman modal (LKPM).
6. Waktu pelaksanaan penyusunan peta potensi terlalu pendek.

Upaya perbaikan yang akan dilakukan:

1. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Dinas PMPTSP Propinsi

dan BKPM.

2. Peningkatan pengawasan secara offline ke lapangan.
3. Penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan di arahkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.
4. Berkooordinasi dengan SKPD lain terkait pengawasan.
5. Optimalisasi tenaga pemantau yang ada di bantu oleh tenaga dari bidang lain di DPMPTSP sendiri.
6. Penambahan tenaga survey lapangan.

Berikut dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang penanaman modal:



Kegiatan Penyelesaian permasalahan dan hambatan dgn PT. WPR



Kegiatan Bimtek implememntasi perizinan&Pengawasan dan LKPM 25 Juni 2024.



Kegiatan EXPO



Kegiatan Pengawasan

2.1.2 Kepala Bidang Data Informasi dan Pengaduan Indikator Kinerja : Indeks kepuasan masyarakat

Capaian realisasi indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat dapat dilihat pada Table sebagai berikut

Tabel 3.11
Hasil Capaian Realisasi Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat terhadap perizinan dan non perizinan	Indeks kepuasan masyarakat	90.50	91,224	100%

- Analisa Perbandingan Realisasi Sasaran Strategis dengan Target

Berdasarkan tabel 3.11 indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat dengan target nilai 90,50 terealisasi sebesar 100%. Jika

LKjIP DPMPTSP TANAH LAUT Tahun 2024

disajikan pada tabel perbandingan kinerja pada tahun sebelumnya maka dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.12
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks kepuasan masyarakat	89,522	90,50	91,224	100%

- **Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target**

Berdasarkan tabel perbandingan target dan realisasi kinerja, maka dapat diketahui bahwa indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2024 mengalami peningkatan nilai yaitu 91,224 (2024) di bandingkan dengan tahun sebelumnya dengan nilai 89,522 (2023).

Adapun faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian nilai indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat tersebut yaitu didukung dengan pagu anggaran 2024 sebesar Rp. 34.988.966 Yang terealisasi sebesar Rp.32.637.350 (93,28 %) dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 2.351.616

Sedangkan faktor yang menjadi penghambat dalam mencapai pemenuhan target yaitu :

1. Persyaratan Perizinan yang berubah – ubah terkait dengan adanya peraturan dari pemerintah pusat yang terbit tidak disertai dengan turunannya.

2. Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh pemohon. Layanan registrasi online sebenarnya sudah dilakukan namun terkendala pada tim teknis dalam mencetak/menerbitkan rekomendasi .

Solusi/pemecahan masalah yang diambil adalah

1. Rapat dengan Tim Teknis (Sudah Dilaksanakan Sebelumnya)
2. Pemberian Informasi Kepada Pemohon (Khusus nya Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.
3. Memberi penjelasan kepada pemohon terkait kendala penerbitan rekomendasi yang berada di Tim Teknis



Gambar :pengisian form Survei Kepuasan Masyarakat oleh pemohon sebagai responden

Tabel 3.14
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase pengaduan yang di Tindaklanjuti	100%	100%	100%	100%

- **Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target**

Berdasarkan tabel perbandingan target dan realisasi kinerja, maka dapat diketahui bahwa Persentase pengaduan yang di tindaklanjuti pada tahun 2024 dan 2023 sama-sama tercapai 100%.

Adapun faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian nilai indikator kinerja Persentase pengaduan yang di tindaklanjuti tersebut yaitu didukung dengan:

1. Pagu anggaran 2024 sebesar Rp.34.988.966 Yang terealisasi sebesar Rp.32.637.350 (93,28%) dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 2.351.616 dan pagu ini merupakan satu kegiatan dengan indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat
2. Kegiatan bimtek dalam rangka meningkatkan kompetensi petugas pelayanan yang telah dilaksanakan 2 kali dalam setahun (2024). Bimtek “Strategi Komunikasi dan Kolaborasi Untuk Peningkatan Investasi dan Pelayanan Publik” Yang dilaksanakan di bali pada tanggal 29 Februari sampai dengan 2 Maret 2024. Dan Bimtek “Peningkatan Rensponsibilitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik” Yang dilaksanakan di Bandung pada tanggal 26 sampai dengan tanggal 29 September 2024



Bimtek “Peningkatan Rensponsibilitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik”



Bimtek Strategi Komunikasi dan Kolaborasi untuk Peningkatan Investasi dan Pelayanan Publik

Sedangkan faktor yang menjadi penghambat dalam mencapai pemenuhan target yaitu Masih adanya pelaku usaha/ pemohon yang belum memahami alur pemrosesan perizinan yang dala hal ini terkait dengan pemenuhan dokumen persyaratan perizinan yang dianggap

mereka lengkap padahal belum bisa dinyatakan lengkap sehingga tidak dapat di proses lebih lanjut.

Solusi/pemecahan masalah yang diambil adalah

1. memberikan pemahaman/penjelasan kepada pelaku usaha/ pemohon bahwa perizinan akan diproses apabila pemenuhan dokumen yang disyaratkan telah dipenuhi/ lengkap.
2. Meningkatkan penyebaran informasi terkait alur/ mekanisme pelayanan perizinan(SOP/SP) melalui media offline (tatap muka,banner,brosur,leaflet,pamflet,baliho) dan online (website, facebook, youtube, whatsapp, Instagram, radio, media cetak online)



Gambar: Rapat pengelolaan pengaduan tahun 2024

Indikator kinerja : Persentase data dan informasi yang valid

Capaian realisasi indikator kinerja Persentase data dan informasi yang valid dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel 3.15
Hasil Capaian Realisasi Sasaran

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Persentase data dan informasi yang valid	4 dokumen	4 dokumen	100%

- Analisa Perbandingan Realisasi Sasaran dengan Target

Berdasarkan tabel 3.15 indikator kinerja Persentase data dan informasi yang valid dengan target 4 Dokumen terealisasi 4 Dokumen yang terdiri dari Dokumen SOP, Standar Pelayanan, Profil, dan Rekap Perizinan. Jika disajikan pada tabel perbandingan kinerja pada tahun sebelumnya maka dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.16
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase data dan informasi yang valid	100%	4 dokumen	4 dokumen	100%

- Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target

Berdasarkan tabel 3.16 perbandingan target dan realisasi kinerja, maka dapat diketahui bahwa Persentase data dan informasi yang valid pada tahun 2024 dan 2023 sama-sama tercapai 4 Dokumen (100%)

Adapun faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian nilai indikator kinerja Persentase data dan informasi yang valid tersebut yaitu didukung dengan:

- pagu anggaran 2024 sebesar Rp 190.181.992 Yang terealisasi sebesar Rp 174.521.450 (91,77%) dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 15.660.642.
- Kegiatan Bimbingan Tekhnis dalam rangka meningkatkan kompetensi petugas pelayanan yang telah dilaksanakan 2 kali dalam setahun (2024). Bimbingan tekhnis Strategi Komunikasi untuk Peningkatan Investasi dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan di Bali pada tanggal 29 Pebruari sampai dengan 2 Maret 2024 dan Bimbingan Tekhnis Peningkatan Rensponsibilitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik yang dilaksanakan di Bandung pada tanggal 26 sampai dengan 29 September 2024.

Sedangkan faktor yang menjadi penghambat dalam mencapai pemenuhan target adalah masih adanya permintaan data dari pihak luar tanpa menyertakan surat permintaan data.

Solusi/pemecahan masalah yaitu dengan memberikan penjelasan bahwa setiap permintaan harus disertai dengan Surat permohonan permintaan data (resmi) agar bisa dipertanggung jawabkan, Sesuai dengan Keputusan Kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Tanah Laut nomor 62/DPMPTSP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Informasi Perizinan dan Nonperizinan Kepada Pemohon yang ditetapkan pada tanggal 12 januari 2021

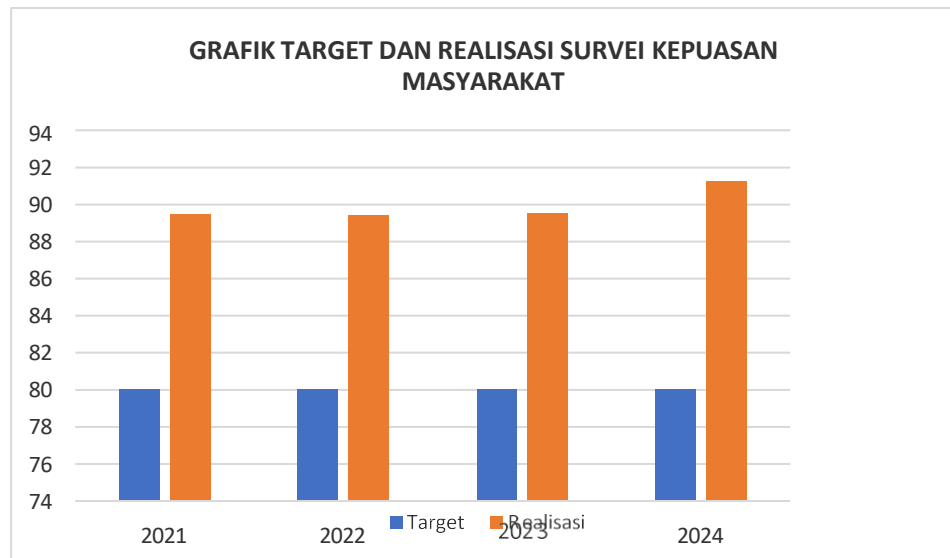
Tabel 3.6

TARGET DAN REALISASI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

TAHUN	TARGET	REALISASI	Persen (%)
2021	80,00	89,460	111,825
2022	80,00	89,411	111,764
2023	80,00	89,522	111,903
2024	80,00	91,224	114,030

Sumber data: Survei Kepuasan Masyarakat DPMPTSP

Menurut hasil survey kepuasan masyarakat, pada tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut memperoleh nilai indeks kepuasan masyarakat dengan nilai 91,224. Pada tahun 2023 memperoleh nilai 89,522 dan tahun 2022 dengan nilai 89,411 Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dari tahun sebelumnya. Pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 91,224.



Secara umum, capaian indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut mengalami peningkatan pada masing-masing indikator seperti:

1. Meningkatnya Investasi di Kabupaten Tanah Laut dalam meningkatkan nilai investasi dilakukan promosi investasi untuk meningkatkan minat investor berinvestasi di Kabupaten Tanah Laut
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat terhadap Perizinan dan Non Perizinan , Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :
 - Persyaratan Perizinan yang berubah – ubah terkait dengan adanya peraturan dari pemerintah pusat yang terbit tidak disertai dengan turunannya.
 - Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh pemohon. Layanan registrasi online sebenarnya sudah dilakukan

namun terkendala pada tim teknis dalam mencetak/menerbitkan rekomendasi

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Persyaratan Pelayanan mendapatkan nilai terendah yaitu 3,36. Selanjutnya Waktu Pelayanan yang mendapatkan nilai 3,47 adalah nilai terendah kedua.
2. Sedangkan dua unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Biaya/tarif mendapatkan nilai tertinggi 3,98 dari unsur layanan, dan Prosedur pelayanan dengan nilai 3,66 .

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- Persyaratan berubah ubah.
- Rekomendasi tim teknis terlalu lama dicetak.

2.1.3 Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha

Tabel 3.17

Hasil Capaian Realisasi Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya Kecepatan Pelayanan Penanaman Modal	Persentase rekomendasi teknis SKPD sesuai ketentuan	1250 Izin	1324 Izin	105%

Rata-Rata Capaian	105%
--------------------------	-------------

Selanjutnya tabel berikut menyajikan perbandingan kinerja tahun 2022 dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.18
Target dan Realisasi Kinerja Tahunan

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase rekomendasi teknis SKPD sesuai dengan ketentuan	2100 izin	1250 izin	1324 izin	105%

- Perbandingan Realisasi dengan Target

Capaian kinerja bidang perizinan dan non perizinan jasa usaha telah terealisasi 100% dari target indikator kinerja persentase rekomendasi teknis SKPD sesuai dengan ketentuan di targetkan sebanyak 1250 izin terealisasi sebanyak 1324 izin, terdiri dari bidang jasa usaha sebanyak 556 izin dan perizinan tertentu sebanyak 768 izin

- Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Perbandingan realisasi penerbitan/validasi perizinan dan non perizinan jasa usaha tahun 2023 dan 2024 lumayan signifikan . Pada tahun 2024 capaian kinerja terealisasi sebanyak 105% atau sebanyak 1324 ijin terdiri dari 768 perizinan dan non perizinan jasa usaha dan 556 perizinan dan non perizinan tertentu sedangkan pada tahun sebelumnya realisasi 2.100 izin dari target 2.500 izin.

- Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

Secara umum capaian kinerja bidang perizinan dan non perizinan jasa usaha mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini dipengaruhi oleh adanya sistem *Online Single Submission (OSS)*. Kendati perizinan dan non perizinan sudah diselenggarakan secara online dan terpusat namun pemohon tetap datang ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut untuk meminta pendampingan pengajuan izin secara online. Izin yang diajukan secara online sebagian besar diverifikasi oleh pusat sehingga tidak terhitung sebagai izin yang sebelumnya dikeluarkan daerah. Oleh sebab itu realisasi penerbitan izin mengalami penurunan.

- Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kerja

1) Program Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota

- Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pelaksanaan program kegiatan bidang perizinan dan non perizinan jasa usaha terlaksana 100% secara fisik pada program pelayanan penanaman modal sub kegiatan Penyediaan Pelayana

Perizinan Berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik dengan realisasi anggaran sebesar Rp 115.620.000,- dari pagu sub kegiatan Rp 119.968.800,- dengan persentase capaian 96,38%. Terdapat efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 4.348.800.

- Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang ada pada Bidang Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha pada tahun 2024 sebanyak 2 orang PNS yang terdiri dari 1 orang kepala bidang Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha, 1 orang staf. Selain itu juga didukung oleh 3 orang tenaga kontrak (PTT).

- Rencana Aksi Anggaran dan Kinerja

- Melakukan koordinasi dengan SKPD teknis

- Kendala dan Perbaikan Ke depannya

Kendala yang dihadapi bidang perizinan dan non perizinan jasa usaha antara lain:

- Sering terlambat rekomendasi yang dikeluarkan oleh SKPD teknis terkait

Perbaikan yang akan diupayakan bidang perizinan dan non perizinan untuk kedepannya yakni:

- Membuat MOU kesepakatan bersama dengan SKPD teknis terkait.



Rapat MOU kesepakatan Bersama dengan SKPD teknis

2.1.4 Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Tertentu

Tabel 3.19

Hasil Capaian Realisasi Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase rekomendasi teknis SKPD sesuai ketentuan	100%	100%

Selanjutnya tabel berikut menyajikan perbandingan kinerja tahun 2024 dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.20
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase rekomendasi teknis SKPD sesuai dengan ketentuan	2100 izin	1250 Izin	1324 izin	105%

- **Perbandingan Realisasi dengan Target**
 Capaian kinerja bidang perizinan dan non perizinan tertentu telah terealisasi 100% dari target indikator kinerja persentase rekomendasi teknis SKPD sesuai dengan ketentuan di targetkan sebanyak 1250 izin terealisasi sebanyak 1.324 izin, terdiri dan bidang jasa usaha sebanyak 768 dan perizinan tertentu sebanyak 556 izin
- **Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait**
 Perbandingan realisasi penerbitan/validasi perizinan dan non perizinan jasa usaha tahun 2023 dan 2024 lumayan signifikan . Pada tahun 2024 capaian kinerja terealisasi sebanyak 105% sedangkan pada tahun sebelumnya 2.204 izin dari target 2.895 izin
- **Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja**
 Secara umum capaian kinerja bidang perizinan dan non perizinan jasa usaha mengalaih penurunan yang cukup signifikan. Hal ini dipengaruhi oleh adanya sistem *Online Single Submission (OSS)*. Kendati perizinan dan non perizinan sudah diselenggarakan secara online dan terpusat namun pemohon tetap datang ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut untuk meminta pendampingan pengajuan izin secara online. Izin

yang diajukan secara online sebagian besar diverifikasi oleh pusat sehingga tidak terhitung sebagai izin yang sebelumnya dikeluarkan daerah. Oleh sebab itu realisasi penerbitan izin mengalami penurunan.

- Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kerja

a) Program Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota

- Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pelaksanaan program kegiatan bidang perizinan dan non perizinan jasa usaha terlaksana 67,17% secara fisik pada program pelayanan perizinan dan non perizinan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 67.650.000 dari pagu program Rp 100.710.000 dengan persentase capaian 67,17%. Terdapat efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 33.060.000.

- Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan program kegiatan bidang perizinan dan non perizinan tertentu terlaksana 100% secara fisik pada program pelayanan penanaman modal sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik dengan realisasi anggaran sebesar Rp 115.620.000,- dari pagu sub kegiatan Rp 119.968.800,- dengan persentase capaian 96,38%. Terdapat efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 4.348.800.

- Rencana Aksi Anggaran dan Kinerja

- Melakukan konsultasi atau sosialisasi kepada pemohon terkait pemenuhan persyaratan perizinan, contoh: harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)

- Melakukan rapat koordinasi apabila terdapat kendala atau permasalahan dalam perizinan
- Kendala dan Perbaikan Ke depannya

Kendala yang dihadapi bidang perizinan dan non perizinan tertentu antara lain:

1. Dari 12 dokumen RDTR Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Tanah Laut 7 yang telah memiliki Pekada atau Perbup RDTR, 3 yang terintegrasi dengan OSS sehingga perizinannya tidak dapat diterbitkan secara otomatis tetapi melalui pertimbangan SKPD teknis.
2. RDTR mengakomodir wilayah perkotaan di kecamatan-kecamatan sedangkan di luar itu melalui penilaian yang memerlukan pertimbangan SKPD teknis yang memerlukan waktu untuk penyelesaian perizinannya.

Perbaikan yang akan diupayakan bidang perizinan dan non perizinan tertentu untuk kedepannya yakni:

1. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan SKPD teknis atau Lembaga terkait.



Keterangan : Bimtek Implementasi Penyelenggaraan PBG Melalui SIMBG oleh PEMDA yang diselenggarakan oleh DINAS PUPR Kalsel



Keterangan : Menghadiri sosialisasi Pajak atas jasa perhotelan bagi pemilik penginapan di pesisir pantai batakan

2. Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Dinas

Tabel berikut di bawah ini memperlihatkan target dan realisasi indikator kinerja Sekretaris tahun 2024:

Tabel 3.7
Hasil Capaian Realisasi Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Nilai komponen perencanaan	90	Masih dalam proses penilaian
		Nilai komponen pengukuran	90	Masih dalam proses penilaian

		Nilai komponen pelaporan	90	Masih dalam proses penilaian
		Nilai komponen evaluasi internal	90	Masih dalam proses penilaian
		Hasil survei pelayanan kesekretariatan	90	Masih dalam proses penilaian
Rata-Rata Capaian				

Selanjutnya tabel berikut menyajikan perbandingan kinerja tahun 2024 dengan capaian tahun-tahun sebelumnya:

Tabel 3.8
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas perencanaan	Nilai Komponen Perencanaan	78,65	90	Masih dalam proses penilaian	
		Nilai Komponen Pengukuran	78,65	90	Masih dalam proses penilaian	
		Nilai Komponen Pelaporan	78,65	90	Masih dalam proses penilaian	
		Nilai Komponen Evaluasi Internal	78,65	90	Masih dalam proses penilaian	
		Hasil survey Pelayanan Kesekretariatan	-	90	Masih dalam proses penilaian	
Rata-Rata Capaian						

- **Analisa Perbandingan Realisasi dengan Target**

Rata-rata Capaian Kinerja Sekretariat telah terealisasi 100%. Dari 4 indikator kinerja, indikator Persentase terkelolanya Administrasi Urusan Umum dan Kepegawaian telah tercapai 100%, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra maka telah tercapai 100% sesuai dengan target. Untuk indikator Persentase penyerapan anggaran DPMPTSP tercapai 99,87% yang jika dibandingkan dengan target nilai 100%, sedangkan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SKPD pada

tahun 2024 masih dalam penilaian, dari target tahun 2024 nilai 90 dan nilai Zona integritas pada tahun 2023 73,98 dan untuk nilai Zona integritas tahun 2024 masih dalam penilaian. Dengan adanya perbaikan SAKIP SKPD sesuai dengan TLHE tahun sebelum maka Dinas Penanaman modal berharap ada kenaikan dibandingkan dengan nilai SAKIP Tahun 2023.

- **Analisa Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait**

Perbandingan target tahun 2024 dengan tahun 2023 yang mana pada tahun 2024 terdiri dari 4 (empat indikator) pada program penunjang urusan pemerintahan daerah/kota semuanya terealisasi 100% dan tahun 2023 realisasinya juga 100%. nilai SAKIP SKPD pada tahun 2023 78,65 (BB) sedangkan nilai SAKIP pada tahun 2024 dalam proses penilaian. Pada tahun 2023 Zona Integritas mendapat nilai 73,98 sedangkan pada tahun 2024 masih dalam proses penilaian. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

Perencanaan Kinerja

- Terhadap dokumen perencanaan telah ditetapkan agar diperhatikan dan dimanfaatkan sebagai acuan perencanaan anggaran tahunan.

Pengukuran Kinerja

- Agar melakukan monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkala.
- Agar kedepannya dapat menyajikan informasi efisiensi atas penggunaan sumber daya (anggaran dan SDM) dalam mencapai kinerja.

Pelaporan Kinerja

- Agar dalam penyusunan laporan kinerja menyajikan data dan analisa atas capaian setiap target kinerja.

- Agar kedepannya dokumen laporan kinerja dapat menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level kabupaten/provinsi/nasional.
- Agar kedepannya dokumen laporan kinerja dapat menyajikan informasi efisiensi atas penggunaan sumber daya (anggaran dan SDM) dalam mencapai kinerja.
- Agar kedepannya dokumen laporan kinerja dapat menyajikan informasi upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- Agar kedepannya dapat melakukan monitoring dan evaluasi internal berkala secara berkualitas dan memadai sebagai alat ukur capaian kinerja dalam memberikan kesan nyata efektivitas dan efisiensi kinerja.
- Agar seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun ini menjadi bahan perbaikan dalam rangka peningkatan pencapaian kinerja di tahun berikutnya.

a. Program/Kegiatan Penunjang Kerja

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Laut

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pelaksanaan program kegiatan Sekretariat hampir terlaksana secara keseluruhan secara fisik pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran sebesar Rp 6.762.256.647 dari pagu program Rp 8.121.923.944,19 dengan persentase capaian 83,26%, ada efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 1.359.667.297,19.
- Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang ada pada Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 sebanyak 10 orang PNS yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan, Kasubbag Keuangan dan 2 orang staf pelaksana. Selain itu juga didukung oleh 10 orang tenaga kontrak (PTT). Keberhasilan capaian program pada Sekretariat didukung oleh beberapa faktor yang cukup berperan penting dalam pencapaiannya, diantaranya:

 - Proses pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian ditangani dengan baik oleh sub bagian umum dan kepegawaian.
 - Kerja sama yang baik dari seluruh personil baik PNS, PTT maupun tenaga teknis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada pada program sekretariat.

- Ketersediaan sarana dan prasarana umum di sekretariat yang cukup terpenuhi dalam menunjang kegiatan.
- Rencana Aksi Anggaran dan Kinerja
 - Dilaksanakan rapat bulanan untuk mengevaluasi progress kinerja masing-masing sub bagian
- Kendala dan Perbaikan Ke depannya
Kendala yang ada pada sekretariat, di antaranya:
 1. Kurangnya SDM pada Sekretariat, karena tenaga kontrak yg ada pada sekretariat sebagian besar bertugas di *front office* sehingga tenaga pada *back office* masih sangat diperlukan mengingat banyaknya indikator penilaian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut.
 2. Kurangnya sarana dan prasarana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut, sehingga kesulitan dalam melaksanakan pekerjaan yang didominasi oleh sistem aplikasi.
- Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya yakni:
 1. Upaya peningkatan kuantitas SDM dengan menyusun analisa jabatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut, untuk segi kualitas perlu dilakukan upaya peningkatan kapasitas aparatur yang ada dengan melaksanakan bimbingan teknis.

Berikut salah satu dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan oleh sekretariat:



Kegiatan Rapat Sekretariat Tahun 2024

2.1 Kepala Sub Bagian Keuangan

Tabel 3.21

Hasil Capaian Realisasi Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya kualitas dokumen pelaporan lingkup perangkat daerah	Persentase dokumen pelaporan lingkup perangkat daerah yang di susun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	100%

Selanjutnya tabel berikut menyajikan perbandingan kinerja tahun 2024 dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.22
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	20 orang/bulan	20 orang/bulan	20 orang/bulan	100%
	Jumlah data laporan kinerja yang di susun	5 laporan	5 dokumen	5 dokumen	100%

- Perbandingan Realisasi dengan Target

Rata-rata capaian Kepala Sub Bagian Keuangan Tahun 2024 sebesar 100%. Terdiri dari 1 sasaran strategis dengan 2 indikator. Pada indikator jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN tercapai 100% dan indicator kedua jumlah data laporan kinerja 5 dokumen terealisasi 5 dokumen yang terdiri atas CALK, laporan bulanan, laporan semester, laporan triwulan, laporan tahunan

- Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

Capaian kinerja sub bagian keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten pada tahun 2024 sama dengan tahun sebelumnya (2023). Hal ini disebabkan oleh kegiatan yang berada di sub bagian keuangan merupakan kegiatan rutin.

- Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kerja
 - Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan SKPD
 - Melaksanakan pengelolaan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD

- Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan telah terlaksana secara keseluruhan secara fisik dengan anggaran sebagai berikut:

a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan

Pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.973.555.498,- dari pagu sub kegiatan Rp 3.534.603.856 dengan persentase capaian 84,13% dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp. 561.048.358 Penyerapan anggaran pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang mencapai 84,13%.

b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3.886.415 dari pagu sub kegiatan Rp 4.905.354 dengan persentase capaian 79,23% dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 1.018.939,-.

- Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Keberhasilan capaian kegiatan pada Sub Bagian Keuangan didukung oleh beberapa faktor penting dalam pencapaiannya, diantaranya:

1. Pengelolaan administrasi keuangan yang dilakukan cukup baik oleh para personil yang merupakan PNS pada sub bagian keuangan.
2. Personil pengelola Penatausahaan Keuangan SKPD yang cukup mempunyai di bidangnya.

- Rencana Aksi Anggaran dan Kinerja

- Melaksanakan rapat pertriwulan untuk mengevaluasi realisasi keuangan dan realisasi fisik masing-masing bidang.

- **Kendala dan Perbaikan Ke depannya**

Kendala yang ada pada sub bagian perencanaan dan keuangan, diantaranya:

1. Terlalu banyaknya aplikasi terkait pelaporan keuangan pada sub bagian keuangan sehingga mengakibatkan perbedaan informasi atas beberapa laporan.

Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya, diantaranya:

- Melakukan penataan dan pembagian tugas-tugas dalam pengelolaan.

2.2 Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Tabel 3.23

Hasil Capaian Realisasi Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya ketaatan penyusunan dokumen	100%	100%	-

Selanjutnya tabel berikut menyajikan perbandingan kinerja tahun 2024 dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.24
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah Dokumen Perencanaan	7 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
2	Jumlah laporan hasil monev	5 laporan	5 laporan	5 laporan	100%

- Perbandingan Realisasi dengan Target

Rata-rata capaian Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2024 sebesar 100%. Terdiri dari 1 sasaran strategis dengan 2 indikator. Indikator pertama jumlah dokumen perencanaan di target sebanyak 4 dokumen dan terealisasi sebanyak 4 dokumen yaitu RKA murni, RKA Perubahan, DPA murni dan DPA Perubahan sedangkan indikator kedua jumlah laporan monev di target sebanyak 5 laporan yaitu LPPD, LKJIP, Renja murni, Renja Perubahan, LKPJ dan terealisasi sebanyak 5 laporan.
- Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

Capaian kinerja sub bagian perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten pada tahun 2024 sama dengan tahun sebelumnya (2023). Hal ini disebabkan oleh kegiatan yang berada di sub bagian perencanaan dan pelaporan merupakan kegiatan rutin.
- Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kerja
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Perencanaan dan Pelaporan telah terlaksana secara keseluruhan secara fisik dengan anggaran sebagai berikut:

- **Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

Pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3.991.900 dari pagu sub kegiatan Rp. 4.999.388 dengan persentase capaian 79,85% dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp. 1.007.488

- **b) Sub Kegiatan Evaluasi kinerja perangkat daerah**

Pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3.943.900 dari pagu sub kegiatan Rp. 4.993.098 dengan persentase capaian 78,99% dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp. 1.049.198

- Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Keberhasilan capaian kegiatan pada Sub Perencanaan dan Pelaporan didukung oleh beberapa faktor penting dalam pencapaiannya, diantaranya:

- Pengelolaan administrasi perencanaan yang dilakukan oleh para PNS dengan rincian 1 orang kepala sub bagian perencanaan dan pelaporan serta 1 orang pengelola bahan perencanaan pada sub bagian perencanaan dan pelaporan. Kendati dengan kuantitas SDM yang relatif sedikit, namun perencanaan dan pelaporan kinerja dapat berjalan cukup baik.

- Rencana Aksi Anggaran dan Kinerja

Rencana aksi anggaran pada Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan yang dianggarkan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan melaksanakan rapat monitoring kegiatan per triwulan.

- Kendala dan Perbaikan Ke depannya

Kendala yang ada pada sub bagian perencanaan dan pelaporan, diantaranya:

1. Terlalu banyaknya tugas-tugas pada sub bagian perencanaan tidak sebanding dengan kuantitas SDM sehingga mengakibatkan seringnya terjadi keterlambatan atas beberapa laporan.

Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya, diantaranya:

1. Menyusun skala prioritas kerja serta melakukan manajemen waktu lebih baik lagi
2. Melakukan penataan dan pembagian tugas-tugas dalam pengelolaan perencanaan dan pelaporan

Berikut dokumentasi kegiatannya:



Rapat Penyusunan RKA 2024



Desk LPPD

2.3 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 3.25
Hasil Capaian Realisasi Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya kualitas layanan kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kepatuhan perangkat daerah menindaklanjuti hasil evaluasi akip	100%	100%	100%
3	Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%
4	Terpenuhinya layanan administrasi umum perkantoran	100%	100%	100%
5	Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%

Selanjutnya tabel berikut menyajikan perbandingan kinerja tahun 2024 dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.26

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pegawai Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	30 orang	30 orang	100%
2	Terlaksananya koordinasi tindak lanjut rekomendasi SAKIP SKPD	Jumlah rapat Koordinasi yang dilaksanakan	12 laporan	12 laporan	100%
3	Terlaksananya layanan urusan rumah Tangga Perangkat Daerah	Jumlah urusan rumah tangga yang di selesaikan sesuai SOP	11 paket	11 paket	100%
4	Terlaksananya layanan urusan rumah tangga perangkat daerah	Jumlah urusan rumah tangga yang di selesaikan sesuai SOP	50 paket	50 paket	
5	Terlaksananya layanan urusan rumah tangga perangkat daerah	Jumlah urusan rumah tangga yang di selesaikan sesuai SOP	2 paket	2 paket	
6	Terlaksananya layanan urusan rumah tangga perangkat daerah	Jumlah urusan rumah tangga yang di selesaikan sesuai SOP	2 paket	2 paket	
7	Terlaksananya layanan urusan rumah tangga perangkat daerah	Jumlah urusan rumah tangga yang di selesaikan sesuai SOP	2 paket	2 paket	
8	Terlaksananya layanan urusan rumah tangga perangkat daerah	Jumlah urusan rumah tangga yang di selesaikan sesuai SOP	1 dokumen	1 dokumen	
9	Terlaksananya layanan urusan	Jumlah urusan rumah tangga	2 dokumen	2 dokumen	

	rumah tangga perangkat daerah	yang di selesaikan sesuai SOP			
10	Terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan aset				

4	Terlaksananya urusan rumah tangga yang di selesaikan sesuai SOP	Jumlah urusan rumah tangga yang di selesaikan sesuai SOP	50 paket	50 paket	100%
5	Terlaksananya urusan rumah tangga yang di selesaikan sesuai SOP	Jumlah urusan rumah tangga yang di selesaikan sesuai SOP	2 paket	2 paket	100%
6	Terlaksananya urusan rumah tangga yang di selesaikan sesuai SOP	Jumlah urusan rumah tangga yang di selesaikan sesuai SOP	2 paket	2 paket	100%
7	Terlaksananya urusan rumah tangga yang di selesaikan sesuai SOP	Jumlah urusan rumah tangga yang di selesaikan sesuai SOP	2 paket	2 paket	99,87% (belanja interior tidak dapat dilaksanakan)
8	Terlaksananya urusan rumah tangga yang di selesaikan sesuai SOP	Jumlah urusan rumah tangga yang di selesaikan sesuai SOP	1 dokumen	1 dokumen	100%
9	Terlaksananya urusan rumah tangga yang di selesaikan sesuai SOP	Terlaksananya urusan rumah tangga yang di selesaikan sesuai SOP	2 dokumen	2 dokumen	100%
10	Terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan asset	Jumlah sarpras yang di sediakan	2 unit	2 unit	100%
11	Terlaksananya pengadaan	Jumlah sarpras yang	4 unit	4 unit	100%

	dan pemeliharaan aset	disediakan			
12	Terlaksananya layanan administrasi persuratan	Jumlah urusan rumah tangga yang di selesaikan SOP	12 laporan	12 laporan	100%
13	Terlaksananya layanan admistrasi persuratan	Jumlah urusan rumah tangga yang diselesaikan sesuai SOP	12 laporan	12 laporan	100%
14	Terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan aset	Jumlah sarpras yang di pelihara	15 unit	15 unit	100%
15	Terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan	Jumlah sarpras yang di pelihara	8 unit	8 unit	100%
16	Terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan aset	Jumlah sarpras yang di pelihara	6 unit	6 unit	100%

- **Perbandingan Realisasi dengan Target**

Rata-rata capaian kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian tahun 2024 sebesar 100%. Terdiri dari 1 sasaran strategis dengan masing-masing 15 indikator kinerja. Semua indicator pada sub bagian kepegawaian terealisasi sebanyak 100 %.

- **Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Capaian kinerja Sub Bagian Umum dan Kepagawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten pada tahun 2024 sama dengan tahun sebelumnya (2023). Hal ini disebabkan oleh kegiatan yang berada di sub bagian umum dan kepegawaian merupakan kegiatan rutin.

- Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kerja
 - Melaksanakan pengelolaan administrasi umum bagi Dinas
 - Melaksanakan pengelolaan data kepegawaian
 - Melaksanakan pengelolaan data aset dan BMD pada dinas
 - Melaksanakan pelayanan surat dinas
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas
- Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Umum dan Kepegawaian hampir terlaksana secara keseluruhan secara fisik sebagai berikut:

a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 17.384.359,00 dari pagu sub kegiatan Rp 19.618.918,00 dengan persentase capaian 88,61% dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 2.234.559,00.

b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 667.538.642,00 dari pagu sub kegiatan Rp 742.997.739,00 dengan persentase capaian 89,84% dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 75.459.097,00.

c) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 31.429.800,00 dari pagu sub kegiatan Rp 39.952.913,00 dengan persentase capaian 78,67% dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 8.523.113,00.

d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material

Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 15.000.000 dari pagu sub kegiatan Rp 250.093.015,00 dengan persentase capaian 6% hal ini di sebabkan belanja back drop untuk Mal Pelayanan Publik tidak dapat di realisasikan karena sampai dengan saat ini belum ada serah terima Gedung Mal Pelayanan Pulbik (MPP) kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

e) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 664.440.336,00 dari pagu sub kegiatan Rp 749.807.048,00 dengan persentase capaian 88,61% dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 85.366.712,00.

f) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 74.999.794,00 dari pagu sub kegiatan Rp 148.120.000,00 dengan persentase capaian 50,63% dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 73.120.206,00

g) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 366,365,952.00 dari pagu sub kegiatan Rp 399,867,909.00 dengan persentase capaian 91,62% dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp. 33.501.957,00

h) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan p

Pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 133,816,777.00 dari pagu sub kegiatan Rp 153,000,000.00 dengan persentase capaian 87,46% dengan efisiensi anggaran Rp. 19.183.223,00.

i) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 34.946.364,00 dari pagu sub kegiatan Rp. 39.904.500,00 yang artinya persentase serapan mencapai 87,57% dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp. 4.958.136,00.

j) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 799,911,516.00 dari pagu sub kegiatan Rp. 941,398,808.69 yang artinya persentase serapan mencapai 84,97% dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp. 141.487.292,69.

k) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 2,681,806.00 dari pagu sub kegiatan Rp. 2,927,304.00 yang artinya persentase serapan mencapai 91,61% dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp. 245.498,00.

l) Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pada SKPD Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 42,720,000.00 dari pagu sub kegiatan Rp. 50,000,000.00 yang artinya persentase serapan mencapai 85,44% dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp. 7.280.000,00.

m) Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 42,720,000.00 dari pagu sub kegiatan Rp. 50,000,000.00 yang artinya persentase serapan mencapai 85,44% dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp. 7.280.000,00.

n) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 387,157,000.00 dari pagu sub kegiatan Rp. 454,779,870.00 yang artinya persentase serapan mencapai 85,13% dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp. 67.622.870,00.

o) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 272,486,588.00 dari pagu sub kegiatan Rp. 300,954,223.30 yang artinya persentase serapan mencapai 90,54% dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp. 28.467.635,30.

p) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 272,486,588.00 dari pagu sub kegiatan Rp. 300,954,223.30 yang artinya persentase serapan mencapai 90,54% dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp. 28.467.635,30.

- Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang tersedia pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian secara keseluruhan ada 15 orang dengan rincian 1 orang PNS (1 orang Kepala Sub Bagan Umum dan Kepegawaian) serta 14 orang tenaga kontrak atau PTT. Berkembangnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan reformasi birokrasi, seiring dengan aplikasi yang semakin kompleks dan perbaikan dari segala sisi. Dengan komposisi SDM yang seperti di atas tersebut, tentu jauh dari kategori ideal. Sehingga masih diperlukan tambahan jumlah PNS pada sub bagian umum dan kepegawaian.

- Rencana Aksi Anggaran dan Kinerja

- Membuat matrik kegiatan sehingga lebih terkontrol
- Melakukan kegiatan segera mungkin sehingga tidak terjadi keterlambatan

- Kendala dan Perbaikan Ke Depan

Kendala yang ada pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, diantaranya:

- Kurangnya personil untuk mengelola data administrasi umum dan kepegawaian

- Banyaknya anggaran yang di selesaikan pada anggaran pagu perubahan

Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya, diantaranya:

- Melakukan pengusulan penambahan personil PNS
- Pemanfaatan sistem informasi persuratan untuk memudahkan penataan surat-menyurat
- Menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana umum guna peningkatan kinerja dinas

Berikut beberapa dokumentasi kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian:



Rapat Internal DPMPTSP 2024



Partisipasi pada Expo Tanah Laut 2024

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2024

Ringkasan Realisasi APBD SKPD 2023 dan 2024

Tabel 3.27

Perbandingan Realisasi Pendapatan dan Belanja SKPD Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian	Realisasi			%	Realisasi			%
		Pagu Tahun 2023 (Rp)	Pagu APBD-P Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)		Pagu Tahun 2024 (Rp)	Pagu APBD-P Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	
4.	PENDAPATAN	1.335.027.000	1.335.027.000	1.373.815.500	102,91	1.100.000.000	1.100.000.000	3.798.150.470	345,29
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.335.027.000	1.335.027.000	1.373.815.500	102,91	1.100.000.000	1.100.000.000	3.798.150.470	345,29
4.1.02	Retribusi Daerah	1.335.027.000	1.335.027.000	1.373.815.500	102,91	1.100.000.000	1.100.000.000	3.798.150.470	345,29
5.	BELANJA DAERAH	5.672.701.131	5.894.758.493	5.323.082.546	90,30	7.288.431.382	9.371.235.165,19	7.966.271.909	85,01
5.1	BELANJA OPERASI	5.494.322.644	5.677.311.336	5.130.996.696	90,38	5.927.033.340	6.806.106.889,30	5.936.364.654	87,22
5.1.01	Belanja Pegawai	3.358.214.793	3.408.214.793	3.039.222.631	89,17	3.379.603.856	3.543.603.856	2.969.371.898	84,01
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.136.107.851	2.269.096.543	2.091.774.065	92,17	2.547.429.484	3.271.503.033,30	2.966.992.756	90,69
5.2	BELANJAMODAL	178.478.487	217.447.157	192.085.850	88,34	1.361.398.042	2.565.128.275,89	2.029.907.255	79,13
5.2.02	Belanja Modal Peralatan Mesin	78.478.487	117.547.157	106.905.850	90,95	1.311.398.042	2.290.035.260,89	1.987.187.255	86,78
5.2.03	Belanja modal Gedung dan bangunan	-	-	-	-	-	225.093.015	-	85,27
5.2.05	Belanja Aset Lainnya	99.900.000	99.900.000	85.180.000	85,27	50.000.000	50.000.000	42.720.000	85,44
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 2024							1.404.963.256,19	

Gambaran tabel 3.26 tersebut di atas menunjukkan bahwa pendapatan retribusi daerah pada tahun 2023 terealisasi sebesar **1.373.815.500 (102,91%)** dan realisasi pendapatan pada tahun 2024 realisasi sebesar Rp. **3.798.150.470 (345,29%)** mengalami peningkatan peningkatan yang sangat signifikan di bandingkan tahun sebelumnya. Pada pos belanja tahun ini realisasi penyerapan dananya sebesar Rp. **7.974.730.509 (85,10%)**, sedangkan pada tahun 2023 realisasi belanja sebesar Rp **5.322.805.646,00**

Dilihat dari pendapatan yang diperoleh dan realisasi belanja yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 ini mengalami SILPA anggaran sebesar Rp **1.404.963.256,19** (Satu milyar empat ratus empat juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh enam koma sembilan belas rupiah).

2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2024 dengan total anggaran sebesar Rp.9.371.235.165,19, terdiri dari Jumlah Program sebanyak atas 6 (enam) program dan 12 (dua belas) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan yang mendukung 3 sasaran startegis SKPD. Berikut di bawah ini adalah rincian anggaran dan realisasi menurut sasaran dan program:

Berikut akan digambarkan perbandingan antara kegiatan-kegiatan yang ada di tahun 2023 dan tahun 2024

Tabel 3.28
Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program

No.	Sasaran	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Meningkatnya realisasi investasi daerah	Pengembangan iklim penanaman modal	39.948.275	39.276.275	98,32
		Promosi Penanaman Modal	532.621.740	529.882.362	99,49
		Program pelayanan penanaman modal	42.820.458	42.679.780	99,67
		Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	288.780.990	277.856.645	96,22
2	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat terhadap perizinan dan non perizinan	Program pelayanan penanaman modal	154.957.766	148.257.350	96,38
		Program pengelolaan data dan system informasi penanaman modal	190.181.992	174.521.450	91,77
3	Meningkatnya kinerja tata kelola DPMPPTSP	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	8.121.923.944,19	6.762.256.647	83,26
Jumlah			9.371.235.165,19	7.974.730.509	85.10

3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023-2024

Tabel 3.29

Tabel Realisasi APBD Tahun Belanja 2023 dan 2024

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.704.419.614	4.263.399.528	90,63	8,121,923,944.19	6,762,256,647	83,26
1)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.974.457	20.951.118	91,19	9,992,486.00	7,935,800.00	79,42
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.979.571	9.074.900	90,93	4,999,388.00	3,991,900.00	79,85
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.994.886	11.876.218	91,39	4,993,098.00	3,943,900.00	78,99
2)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.418.146.211	3,046.307.631	89,12	3,539,509,210.00	2,977,441,913.00	84,12
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.408.214.793	3.039.222.631	89,17	3,534,603,856.00	2,973,555,498.00	84,13
5	Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.931.418	7.085.000	71,34	4,905,354.00	3,886,415.00	79,23
5)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	261,670,893	228,286,895	87,24	2,796,795,745.89	2,241,106,459.00	80,13
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.868.545	5.271.271	89,82	19,618,918.00	17,384,359.00	88,61
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	169.475.678	149.759.079	88,37	742,997,739.20	667,538,642.00	89,84
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				941,398,808.69	799,911,516.00	84,97
15	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.888.358	38.071.557	88,77	39,952,913.00	31,429,800.00	78,67
16	Penyediaan Bahan/Material	9.430.000	9.430.000	100	250,093,015.00	15,000,000.00	6

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	347.250.000	343.408.225	85,27	749,807,048.00	664,440,336.00	88,61
18	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2,927,304.00	2,681,806.00	91,61
19	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				50,000,000.00	42,720,000.00	85,44
6)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				755,734,093.30	659,643,588.00	87,29
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				454,779,870.00	387,157,000.00	85,13
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				300,954,223.30	272,486,588.00	90,54
6)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	453,520,021	441,368,496	97.32	547,987,909.00	441,365,746.00	80,54
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91.040.000	77.921.673	85,59	148,120,000.00	74,999,794.00	50,63
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	374,051,071	369,531,746	98.79	399,867,909.00	366,365,952.00	91,62
7)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.639.000	113.945.080	98,54	192,904,500.00	168,763,141.00	87,49
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	103.540.000	103.045.080	99,52	153,000,000.00	133,816,777.00	87,46
22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.099.000	10.900.000	90,09	39,904,500.00	34,946,364.00	87,57
II	PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-	-	0	39,948,275.00	39,276,275.00	98,32
8)	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	31.294.323	18.844.450	60,22	39,948,275.00	39,276,275.00	98,32
23	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	31.294.323	18.844.450	60,22	39,948,275.00	39,276,275.00	98,32

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
III	PROMOSI PENANAMAN MODAL	434.828.300	426.969.868	98,19	532,621,740.00	529,882,362.00	96,54
9)	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	434.828.300	426.969.868	98,19	532,621,740.00	529,882,362.00	96,54
24	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	434.828.300	426.969.868	98,19	532,621,740.00	529,882,362.00	96,54
IV	PELAYANAN PENANAMAN MODAL	137.184.647	99.220.480	72,33	197,778,224.00	190,937,130.00	96,54
10)	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	137.184.647	99.220.480	72,33	197,778,224.00	190,937,130.00	96,54
25	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara Elektronik	100.710.000	67.650.000	96,60	119,968,800.00	115,620,000.00	96,38
26	Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	19.976.980	15.516.980	77,67	42,820,458.00	42,679,780.00	99,67
27	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	16.497.667	16.053.500	97,30	34,988,966.00	32,637,350.00	93,28
V	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	427.799.348	367.612.060	85,93	288,780,990.00	277,856,645.00	96,22
11)	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	427.799.348	367.612.060	85,93	288,780,990.00	277,856,645.00	96,22
29	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	402.466.428	344.444.140	85,58	158,830,980.00	158,346,635.00	99,7

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
30	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	159.232.261	147.036.160	92,34	86,633,512.00	80,803,512.00	93,27
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan usahanya				43,316,498.00	38,706,498.00	89,36
VI	PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	159.232.261	147.036.160	92,34	190,181,992.00	174,521,450.00	91,77
12)	Pengolahan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	159.232.261	147.036.160	92,34	190,181,992.00	174,521,450.00	91,77
31	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	159.232.261	147.036.160	92,34	190,181,992.00	174,521,450.00	91,77
Jumlah		5.894.758.493	5.323.082.546	90,30	9,371,235,165.19	7,974,730,509.00	85,1

Dari tabel perbandingan realisasi anggaran Tahun 2023 dengan Tahun 2024 di atas dapat dilihat bahwa belanja tahun 2023 dengan pagu anggaran Rp 5.894.758.493 telah terealisasi sebesar Rp 5.323.082.493 dengan persentase 90,30% sedangkan pada tahun 2024 dengan pagu anggaran Rp 9.371.235.165,19 telah terealisasi sebesar Rp 7.974.730.509 dengan persentase 85,10%. Dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan realisasi sebesar 16,80%. Pagu anggaran belanja yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 lebih banyak dibandingkan dengan pagu anggaran pada tahun 2023, untuk efisiensi dan efektivitas anggaran pada kegiatan yang prioritas dalam pembangunan di Kabupaten Tanah Laut. Dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditentukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut mengalami beberapa hambatan dan kendala. Hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Sarana dan prasarana yang tidak presentatif
- b. Terbatasnya sumber daya manusia dan tenaga sebagai pelaksana kegiatan
- c. Koordinasi lintas sektoral yang masih belum optimal dalam mendukung percepatan penerbitan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Tanah Laut

Untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut di atas diperlukan upaya-upaya penanggulangan yakni sebagai berikut:

- a. Peningkatan sarana dan prasarana
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tenaga melalui pendidikan dan pelatihan, seminar dan semacamnya serta penambahan personil melalui peninjauan ulan analisa jabatan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kinerja tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan selama Tahun 2024. Sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis beserta target-targetnya adalah informasi yang diharapkan dapat diberikan melalui LKjIP ini.

Secara umum pencapaian kinerja sasaran dapat memenuhi target sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun terdapat indikator sasaran strategis yang tidak tercapai. Tingkat capaian kinerja yang harus dipertanggungjawabkan melalui indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah 3 (tiga) sasaran strategis yang terdiri atas 3 (tiga) sasaran IKU dengan 3 (tiga) indikator.

Berdasarkan hasil uraian pada Bab-Bab dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan ini diketahui bahwa :

1. Hasil evaluasi kinerja ini merupakan hasil evaluasi kinerja dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut, yang dalam hal ini juga berarti bahwa kinerja dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut dengan realisasi fisik 99,87% dan realisasi keuangan 85,10 %, dengan kategori capaian realisasi fisik sangat memuaskan dan realisasi keuangan baik, walaupun dalam beberapa hal masih ada hambatan atau kendala yang harus diperbaiki pada masa mendatang secara berkelanjutan.
2. Realisasi investasi Capaian Rp 2.719.130.870.000 dari target Rp 1.568.660.000.000 dengan angka capaian 173%. Nilai IKM

yang merupakan sasaran strategis dari IKU yang kedua meraih nilai 91,224 dari target 90,50.

3. Pada Anggaran Murni tahun 2024, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut mengelola Anggaran sebesar Rp. 7.288.431.382 yang kemudian anggaran tersebut menjadi meningkat pada APBD Perubahan 2024 menjadi Rp 9.371.235.165,19.
4. Belanja Operasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp 5.936.364.654 (87,22%) dari pagu Rp 6.806.106.88,30.
5. Belanja Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut pada 2024 sebesar Rp2.029.907.255 (79,13) dari pagu sebesar Rp 2.565.128.275,89 .
6. Pada laporan kinerja tahun 2024 ini penyampaian kinerja disampaikan dari level Eselon II, Eselon III, hingga level Eselon IV sehingga penggambaran akuntabilitas kinerja diharapkan dapat tergambar secara lebih jelas per individu pejabatnya sebagai wujud pencapaian Perjanjian Kinerja tiap individu.

Dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditentukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut mengalami beberapa hambatan. Hambatan yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

1. Sarana dan prasarana yang tidak presentatif
2. Terbatasnya sumber daya manusia dan tenaga sebagai pelaksana kegiatan
3. Kurangnya intensifnya koordinasi antar instansi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan

Untuk mengatasi hambatan tersebut di atas diperlukan upaya untuk menanggulangi masalah tersebut, antara lain sebagai berikut

1. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tenaga melalui pendidikan dan pelatihan, seminar dan semacamnya serta penambahan personil melalui peninjauan ulan analisa jabatan
3. Membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi lain untuk mempermudah koordinasi

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Berdasarkan penelaahan terhadap kinerja SKPD yang diuraikan diatas dapat disampaikan beberapa strategi peningkatan Kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut yaitu :

1. Diperlukannya sarana dan prasarana yang presentatif untuk menunjang kinerja terutama Mal Pelayanan Publik sebagai indikator penting dalam penilaian indeks pelayanan publik. Kegiatan lapangan yang kerap dilaksanakan juga memerlukan fasilitas pendukung yakni kendaraan dinas. Kuantitas maupun kualitas kendaraan dinas yang tersedia masih sangat kurang memadai.
2. Penyusunan anggaran yang lebih efisien dan efektif, penyusunan anggaran harus lebih hemat dan menghindari penyusunan anggaran yang cenderung sama dan rutin setiap tahun.
3. Meningkatkan kualitas jaringan untuk mengoptimalkan pelayanan sesuai Standar Operational Prosedur (SOP)
4. Perlu adanya Bimbingan Teknis untuk Tim Teknis dan seluruh ASN di Lingkup Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut terkait sistem OSS yang sudah diberlakukan.

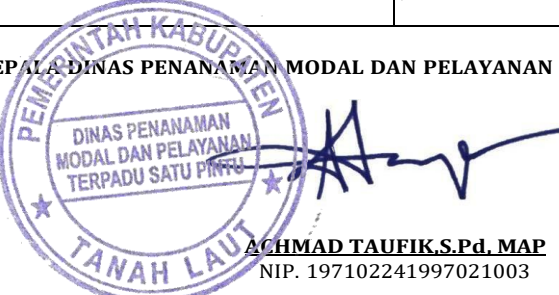
-o0o-

**Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2024**

Kabupaten : Tanah Laut
 Nama SKPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
 Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal daerah dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
 b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang penanaman modal daerah dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
 c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penanaman modal daerah dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
 d. Pelaksanaan administrasi dinas;
 e. Pembinaan UPT Dinas;
 f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

No.	Kinerja Utama/ Outcome/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggungjawab / Sumber Data
1	Nilai Realisasi Investasi Daerah	1 Nilai Realisasi Investasi	Angka Realisasi investasi	DPMPPTSP
2	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat terhadap terhadap perizinan dan non perizinan	1 Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey	DPMPPTSP

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



ACHMAD TAUFIK,S.Pd, MAP
 NIP. 197102241997021003



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
INSPEKTORAT

Jalan A.Syairani Kompl. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 22384 Pelaihari

Pelaihari, 01 April 2024

Nomor : 700.1.2.1/066/LHE AKIP- Irban III/Insp/ 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Tahun 2023

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan terpadu satu pintu
Kabupaten Tanah Laut
di-

Pelaihari

Dengan ini kami sampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu satu pintu dengan uraian sebagai berikut :

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 68 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, dan;
- g. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 800.1.11.1/108/ Insp/ 2024 tanggal 14 Maret 2024.

2. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi tentang implelementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi :

- a. Perencanaan Kinerja;
- b. Pengukuran Kinerja;
- c. Pelaporan Kinerja;
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Dalam pelaksanaan evaluasi dokumen yang diperlukan adalah :

- a. Renstra SKPD;
- b. Renja SKPD;
- c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ;
- d. Indikator Kinerja Utama (IKU);
- e. Perjanjian Kinerja (PK);
- f. Cascading;
- g. Pohon Kinerja;
- h. Laporan Kinerja;
- i. Dokumen lain yang mendukung.

4. Hasil Evaluasi

Hasil Evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Tanah Laut menunjukkan nilai sebesar 78.65 dengan predikat **"BB"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"Sangat Baik"**, yaitu Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki system kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi serta pengukuran kinerja terlag dilakukan sampai level eselon 3/koordinator

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

Komponen yang di nilai	Bobot	Nilai atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	
		2022	2023
a. Perencanaan Kinerja	30	24	23,70
b. Pengukuran Kinerja	30	24	24,60
c. Pelaporan Kinerja	15	12	11,10
d. Evaluasi Internal	25	20	19,25
Nilai Hasil Evaluasi	100	80	78,65
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

5. Catatan Hasil Evaluasi

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas pada Dinas Penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu tahun 2023 sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Dari segi komponen perencanaan kinerja, terdapat catatan sebagai berikut:

1. Penyusunan perencanaan kinerja belum dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi dan kebijakan;
2. Pimpinan belum sepenuhnya terlibat dalam pencapaian kinerja;
3. Masih terdapat target yang sama persis yang di ampu 2 pejabat padahal memiliki indikator yang berbeda

b. Pengukuran Kinerja

Dari segi komponen pengukuran kinerja, terdapat catatan sebagai berikut :

1. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala (triwulan) namun belum sepenuhnya digunakan untuk penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran;
2. SKPD telah melakukan perubahan Renja, namun perubahan tersebut belum berdasarkan hasil analisis pengukuran kinerja berkala (monev per triwulan) dan tidak ada alasan yang jelas terkait penyesuaian anggaran yang dilakukan

c. Pelaporan Kinerja

Dari segi komponen pelaporan kinerja, terdapat catatan sebagai berikut :

1. Laporan kinerja berkala telah disusun, namun belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian aktivitas dan anggaran untuk mencapai kinerja;

2. Laporan kinerja telah disusun, namun belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya;
3. Dokumen kinerja belum sepenuhnya menggambarkan terkait proses pencapaian kinerja atas IKU SKPD ataupun analisis hanya menggambarkan perbandingan antara target dan realisasi dengan penjelasan yang belum cukup memadai mengenai cara-cara atau pun hal-hal yang mendukung pencapaian kinerja

d. Evaluasi Internal

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu Pintu telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi internal (Inspektorat) tahun sebelumnya, namun belum sepenuhnya sesuai

6. Rekomendasi

Berdasarkan temuan/catatan diatas, dalam rangka implementasi akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja

1. Dalam Penyusunan perencanaan kinerja agar mempedomani laporan kinerja tahun sebelumnya dan hasil monitoring evaluasi tahun berjalan;
2. Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja agar pimpinan memberikan umpan balik (*feedback*) yang jelas dan terarah;
3. Dalam setiap dokumen perencanaan kinerja agar dapat memperhatikan keselarasan indikator kinerja dan target ;
4. Agar kedepannya lebih memperhatikan penetapan target yang sesuai dengan indicator

b. Pengukuran Kinerja

1. Agar penyesuaian strategi, kebijakan dan perubahan anggaran dibahas/terdokumentasi secara rinci dalam laporan monitoring evaluasi berkala (pertriwulan);
2. Dalam melakukan perubahan Renja, agar berdasarkan hasil analisis pengukuran kinerja berkala (monev per triwulan) dan laporan kinerja tahun sebelumnya;
3. Setiap pegawai telah menetapkan sasaran kinerja (SKP) berdasarkan kinerja yang diperjanjikan (PK). pada SKP feedback pimpinan terhadap

hasil capaian kinerja agar menyajikan umpan balik yang terarah dan berkelanjutan;

c. Pelaporan Kinerja

1. Laporan kinerja berkala (Monev per triwulan) yang disusun agar digunakan dalam penyesuaian aktivitas dan anggaran;
2. Laporan kinerja yang disusun agar digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
3. Agar didalam Laporan Kinerja dan data capaian triwulan ditambahkan informasi yang cukup memadai dan sumber data yang akurat tentang pencapaian target serta dokumentasi yang relevan untuk masing masing indikator sasaran
4. Agar didalam laporan kinerja ditambahkan tabel pembanding dan analisa antara target dan realisasi setiap indikator dan target beberapa tahun sebelumnya (Jika sudah ada realisasinya) agar lebih informatif
5. Agar dilakukan rewiu berjenjang atas laporan kinerja tahunan dan data capaian triwulan yang dibuat sehingga informasi yang disajikan lebih berkualitas, tidak hanya sekedar pemenuhan dokumen tetapi nyata di laksanakan sehingga menjadi perhatian pimpinan dan kepedulian seluruh pegawai

d. Evaluasi Internal

1. Agar segera menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil evaluasi internal tahun 2023 dengan menyusun rencana aksi tindak lanjut;
2. Agar menyampaikan laporan monitoring evaluasi per triwulan tahun 2024 kepada Inspektur Kabupaten Tanah Laut.

7. Tindak lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Evaluasi juga mempertimbangkan atas tindak lanjut hasil rekomendasi yang telah diberikan tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut evaluasi SAKIP tahun sebelumnya Dinas Penanaman Modal Pelayanan satu Pintu Kabupaten Tanah Laut sebagian besar telah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan.

Saat ini Dinas Penanaman Modal Pelayanan satu Pintu Kabupaten Tanah Laut telah melakukan upaya perbaikan sebagai berikut :

- a. Menyusun renstra SKPD tahun 2024–2026, sebagai dokumen perencanaan transisi menuju 2026;
- b. Membuat pohon kinerja sebagai dasar untuk menyusun perencanaan;

Demikian disampaikan hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan satu Pintu Kabupaten Tanah Laut, atas perhatian dan kerjasama yang baik di ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Pj. Bupati Tanah Laut di Pelaihari
2. Menteri PAN dan RB di Jakarta
3. Arsip

**LEMBAR KERJA EVALUASI IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERIODE EVALUASI 2023**

No	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	BOBOT	KRITERIA	NILAI	%-TASE
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00		23,70	79,00%
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	A	5,40	90,00%
1)	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang				
2)	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah				
3)	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek				
4)	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja				
5)	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja				
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (<i>cascading</i>) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)	9,00	B	6,30	70,00%
1)	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan				
2)	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu				
3)	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai				
4)	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai				
5)	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (<i>sustainable</i> - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis)				
6)	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART				
7)	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (<i>achievable</i>) dan realistis				

No	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	BOBOT	KRITERIA	NILAI	%-TASE
8)	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading)				
9)	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).				
10)	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track				
11)	Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja				
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	BB	12,00	80,00%
1)	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai				
2)	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai				
3)	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala				
4)	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya				
5)	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik				
6)	Setiap unit/satuan kerja berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan				
7)	Pimpinan terlibat dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan				

No	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	BOBOT	KRITERIA	NILAI	%-TASE
8)	Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan				
9)	Kinerja Individu telah selaras dengan kinerja organisasi				
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00		24,60	82,00%
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	A	5,40	90,00%
1)	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator				
2)	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan				
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	BB	7,20	80,00%
1)	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan				
2)	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan				
3)	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala				
4)	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang				
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	BB	12,00	80,00%
1)	Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja				
2)	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan				
3)	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja				
4)	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja				

No	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	BOBOT	KRITERIA	NILAI	%-TASE
5)	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja				
6)	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja				
7)	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja				
8)	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja				
3	PELAPORAN KINERJA	15,00		11,10	74,00%
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	A	2,70	90,00%
1)	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun				
2)	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan				
3)	Dokumen Laporan Kinerja telah direviu				
4)	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan				
5)	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu				
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	B	3,15	70,00%
1)	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.				
2)	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan.				
3)	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka				
4)	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.				
6)	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.				

No	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	BOBOT	KRITERIA	NILAI	%-TASE
7)	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.				
8)	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).				
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	B	5,25	70,00%
1)	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab)				
2)	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai				
3)	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja				
4)	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja				
5)	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja				
6)	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya				
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00		19,25	77,00%
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	BB	4,00	80,00%
1)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah				
2)	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti				
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	B	5,25	70,00%

No	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	BOBOT	KRITERIA	NILAI	%-TASE
1)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai				
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja	12,50	BB	10,00	80,00%
1)	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja				
2)	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal				
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100,00		78,65	78,65%
PREDIKAT		SANGAT BAIK			

Kesimpulan Hasil Evaluasi :

Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja. Memiliki sistem kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level eselon 3/ koordinator

Wakil Penanggung Jawab



Hj. Dwi Laksmi Yunika, ST, MT
NIP. 19700629 199203 2 011

Evaluator



Amy Yuniarty, SE, Ak
NIP. 19850503 201001 2 035



**PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON II
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalarn rangka rnewujudkan rnanajernen pernerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada basil, karni yang bertanda tangan di bawah ini:

Narna : **ACHMAD TAUFIKS.Pd, MAP**
Jabatan : **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**


Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Narna : **Syamsir Rahman**
Jabatan : **PJ. BUPATI TANAH LAUT**

Selaku atasan langsung pihak pertarna, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertarna berjanji akan rnewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka rncapai target kinerja jangka rnenengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab karni.

Pihak kedua akan rnelakukan supervisi yang diperlukan serta akan rnelakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan rnenambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
PJ  LAUT

Syamsir Rahman

Tanah Laut, 23 September 2024

Pihak Pertama

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



ACHMAD TAUFIKS.Pd, MAP
NIP. 197102241997021003

**PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON II
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Nilai Realisasi Investasi Daerah		
	1 I Nilai Realisasi Investasi	Juta	1568663530
2	Me ningkatnya kualitas pelayanan masyarakat terhadap terhadap perizinan dan non perizinan		
	1 Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase	90.50
3	Meningkatnya kinerja tata kelola DPMPSTP		
	1 I Nilai SAKIP SKPD	I Nilai	I 82

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN**ANGGARAN**

2.18.02. Program PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rp. Rp 39.948.275,00
2.18.02.2.02. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Rp. Rp 39.948.275,00
2.18.02.2.02.02. SubKegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Rp. Rp 39.948.275,00
2.18.05. Program PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rp. Rp 288.780.990,00
2.18.05.2.01. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. Rp 288.780.990,00
2.18.05.2.01.06. SubKegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Rp. Rp 86.633.512,00
2.18.05.2.01.05. SubKegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Rp. Rp 158.830.980,00
2.18.05.2.01.04. SubKegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Rp. Rp 43-316-498,00
2.18.03. Program PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Rp. Rp 449.999.429,00
2.18.03.2.01. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. Rp 449.999.429,00
2.18.03.2.01.02. SubKegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Rp. Rp 449_999_429,00
2.18.04. Program PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp. Rp 197.778.224,00
2.18.04.2.01. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. Rp 197.778.224,00
2.18.04.2.01.08. SubKegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Rp. Rp 42.820.458 00
2.18.04.2.01.06. SubKegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Rp. Rp 119_968_800,00
2.18.04.2.01.03. SubKegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Rp. Rp 34.988.966,00

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
2.18.06. Program PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Rp. Rp 190.181.992,00
2.18.06.2.01. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. Rp 190.181.992,00
2.18.06.2.01.01. SubKegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp. Rp 190.181.992,00
2.18.01. Program PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. Rp 8.121.923.924,19
2.18.01.2.01. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. Rp 9.992.486,00
2.18.01.2.01.01. SubKegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. Rp 4.999.388,00
2.18.01.2.01.07. SubKegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. Rp 4.993.098,00 Rp.
2.18.01.2.02. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 3.539.509.210,00
2.18.01.2.02.01. SubKegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. Rp 3.534.603.856,00
2.18.01.2.02.03. SubKegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Nerifikasi Keuangan SKPD	Rp. Rp 4.905.354,00
2.18.01.2.06. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
2.18.01.2.06.09. SubKegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rp. Rp 742_997_739,00
2.18.01.2.06.01. SubKegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. Rp 19.618.918,00
2.18.01.2.06.02. SubKegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. Rp 742.997.739,00
2.18.01.2.06.03. SubKegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. Rp 941.398.808,00
2.18.01.2.06.05. SubKegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. Rp 39.952.913,00
2.18.01.2.06.07. SubKegiatan Penyediaan Bahan/Material	Rp. Rp 250.093.015,00
2.18.01.2.06.10. SubKegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp. Rp 2.927.304,00
2.18.01.2.06.11. SubKegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp. Rp 50.000.000,00
2.18.01.2.05. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. Rp 279.000.000,00
2.18.01.2.05.09. SubKegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. Rp 279.000.000,00
2.18.01.2.07. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. Rp 755.734.093,30
2.18.01.2.07.11. SubKegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. Rp 300.954.223,30
2.18.01.2.07.02. SubKegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. Rp 454.779.870,00
2.18.01.2.09. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. Rp 192_904_500,00
2.18.01.2.09.02. SubKegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. Rp 153.000.000,00
2.18.01.2.09.06. SubKegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. Rp 39.904.500,00

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN

ANGGARAN

2.18.01.2.09.10. SubKegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Banyunan Lainnya

Rp. 0,00

2.18.01.2.08. Kegiatan PenyediaanJasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah Rp. Rp 547.987.909,00

2.18.01.2.08.02. SubKegiatan PenyediaanJasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Rp. Rp 148.120.000,00

2.18.01.2.08.04. SubKegiatan PenyediaanJasa Pelayanan Umum Kantor

Rp. Rp 399.867.909,00

Pihak Kedua

Pj. BUPATI TANAH LAUT



Tanah Laut, 23 September 2024

Pihak Pertama

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ACHMAD TAUFIKS.Pd, MAP

NIP. 197102241997021003



**PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON III
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **IRMA ROSANTI S.Sos.,M.I.Kom.**
Jabatan : **SEKRETARIS**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ACHMAD TAUFIK S.Pd, MAP**
Jabatan : **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

ACHMAD TAUFIKS.Pd, MAP
NIP. 197102241997021003

Tanah Laut, 23 September 2024
Pihak Pertama SEKRETARIS

IRMA ROSANTIS.Sos.,M.I.Kom.
NIP. 197302252006042006

**PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON III
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024**

NO	SASARAN PROGRAM / PROGRAM / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
1	Meningkatnya kualitas perencanaan			
	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	1	Nilai komponen perencanaan	Nilai	90
	2	Nilai komponen pengukuran	Nilai	90
	3	Nilai komponen pelaporan	Nilai	90
	4	Nilai komponen evaluasi internal	Nilai	90
	5	Hasil survei pelayanan kesekretariatan	Nilai	90

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**ANGGARAN**

2.18.01. Program PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 8.121.923.944,19
2.18.01.2.01. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 9.992.486,00
2.18.01.2.01.01. SubKegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 4.999.388,00
2.18.01.2.01.07. SubKegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 4.993.098,00
2.18.01.2.02. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 3.539.509.210,00
2.18.01.2.02.01. SubKegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 3.534.603.856,00
2.18.01.2.02.03. SubKegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 4.905.354,00
2.18.01.2.06. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 2.796.795.745,89
2.18.01.2.06.09. SubKegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. Rp749.807.048,00
2.18.01.2.06.01. SubKegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan	Rp. 19.618.918,00
2.18.01.2.06.02. SubKegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 742.997.739,020
2.18.01.2.06.03. SubKegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. Rp 941.398.808,69
2.18.01.2.06.05. SubKegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. Rp 39.952.913,00
2.18.01.2.06.07. SubKegiatan Penyediaan Bahan/Material	Rp. Rp 250.093.015,00
2.18.01.2.06.10. SubKegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp. Rp 2.927.304,00
2.18.01.2.06.11. SubKegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp. Rp 50.000.000,00
2.18.01.2.05. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. Rp 279.000.000,00
2.18.01.2.05.09. SubKegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. Rp 279.000.000,00

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
2.18.01.2.07. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. Rp 755.734.093,30
2.18.01.2.07.11. SubKegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. Rp 300.954.223,30
2.18.01.2.07.02. SubKegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. Rp 454.779.870,00
2.18.01.2.09. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. Rp 192.904.500,00
2.18.01.2.09.02. SubKegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. Rp 153.000.000,00
2.18.01.2.09.06. SubKegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. Rp 39.904.500,00
2.18.01.2.09.10. SubKegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. Rp 0,00.
2.18.01.2.08. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. Rp 547.987.909,00
2.18.01.2.08.02. SubKegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. Rp 148.120.000,00
2.18.01.2.08.04. SubKegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. Rp 399.867.909,00

Pihak Kedua
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**



ACHMAD TAUFIKS.Pd, MAP
NIP. 197102241997021003

Tanah Laut, 23 September 2024
Pihak Pertama

SEKRETARIS



IRMA ROSANTIS.Sos.,M.I.Kom.
NIP. 197302252006042006



**PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON III
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT APBD
PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **BUDI ANDRIAN SUTANTO, S.SOS**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TERTENTU**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ACHMAD TAUFIK, S.Pd, MAP**
Jabatan : **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ACHMAD TAUFIKS.Pd, MAP
NIP. 197102241997021003

Tanah Laut, 23 September 2024
Pihak Pertama
KEPALA BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
TERTENTU

BUDI ANDRIAN SUTANTO, S.SOS
NIP. 197602182007011006

**PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON III
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024**

NO	SASARAN PROGRAM / PROGRAM / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan dan non perizinan		
	1	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
	3	Presentase Rekomendasi teknis SKPD Sesuai dengan ketentuan	Persen 100

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**ANGGARAN**

2.18.04. Program PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp. Rp 197.778.224,00
2.18.04.2.01. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. Rp 197.778.224,00
2.18.04.2.01.08. SubKegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Rp. Rp 42.820.458,00
2.18.04.2.01.06. SubKegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Rp. Rp 119.968.800,00
2.18.04.2.01.03. SubKegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Rp. Rp 34.988.966,00

Pihak Kedua

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



ACHMAD TAUFIK, S.Pd, MAP
NIP. 197102241997021003

Tanah Laut, 23 September 2024

Pihak Pertama

KEPALA BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
TERTENTU



BUDI ANDRIAN SUTANTO, S.SOS
NIP. 197602182007011006



**PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON III
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **EMROHAYAT S.Pt**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ACHMAD TAUFIK S.Pd, MAP**
Jabatan : **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

ACHMAD TAUFIK S.Pd, MAP
NIP. 197102241997021003

Tanah Laut, 23 September 2024
Pihak Pertama

EMROHAYAT S.Pt
NIP. 197311101993031003

**PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON III
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024**

NO	SASARAN PROGRAM / PROGRAM / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya pengembangan iklim penanaman modal yang kondusif		
	1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
	1	Jumlah Investor yang berinvestasi	Pelaku Usaha 25
2	Meningkatnya pengembangan iklim penanaman modal yang kondusif		
	2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
	1	Jumlah Investor yang berinvestasi	Investor 100
3	Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan dan non perizinan		
	3	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
	4	persentase hasil rekomendasi pengawasan, pemantauan dan permasalahan dan hambatan yang ditindaklanjuti	persentase 100
4	Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal		
	4	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
	1	Persentase perusahaan yang melaporkan LKPM tepat waktu	persen 20

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**ANGGARAN**

2.18.02. Program PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rp. Rp 39.948.275,00
2.18.02.2.02. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Rp. Rp 39.948.275,00
2.18.02.2.02.02. SubKegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Rp. Rp 39.948.275,00
2.18.03. Program PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Rp. Rp 449.999.429,00
2.18.03.2.01. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. Rp 449.999.429,00
2.18.03.2.01.02. SubKegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Rp. Rp 449.999.429,00
2.18.04. Program PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp. Rp 197.778.224,00
2.18.04.2.01. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. Rp 197.778.224,00
2.18.04.2.01.08. SubKegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Rp. Rp 42.820.458,00
2.18.04.2.01.06. SubKegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Rp. Rp 119.968.800,00
2.18.04.2.01.03. SubKegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Rp. Rp 34.988.966,00
2.18.05. Program PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rp. Rp 288.780.990,00

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN

ANGGARAN

2.18.05.2.01. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Rp. Rp 288.780.990,00

2.18.05.2.01.06. SubKegiatan Pengawasan Penanaman Modal

Rp. Rp 86.633.512,00

2.18.05.2.01.05. SubKegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha

Rp. Rp 158.830.980,00

2.18.05.2.01.04. SubKegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya

Rp. Rp 43.316.498,00

Pihak Kedua

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU



ACHMAD TAUFIK S.Pd, MAP
NIP. 197102241997021003

Tanah Laut, 23 September 2024

Pihak Pertama

KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL



EMROHAYAT S.Pt
NIP. 197311101993031003



**PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESEI,ON III
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PEI,AYANAN TEIU'ADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SURIANSYAH S.SOS**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN JASA USAHA**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ACHMAD TAUFIK S.Pd, MAP**
Jabatan : **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

ACHMAD TAUFIKS.Pd, MAP
NIP. 197102241997021003

Tanah Laut, 23 September 2024
Pihak Pertama
**KEPALA BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
JASA USAHA**

SURIANSYAH S.SOS
NIP. 196703061992031006

**PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESEI,ON III
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024**

NO	SASARAN PROGRAM / PROGRAM / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan dan non perizinan		
1	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		
3	Presentase Rekomendasi teknis SKPD Sesuai dengan ketentuan	Persen	100

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN

2.18.04. Program PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

2.18.04.2.01. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

2.18.04.2.01.08. SubKegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko

2.18.04.2.01.06. SubKegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik

2.18.04.2.01.03. SubKegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

ANGGARAN

Rp. Rp 197.77H.224,00

Rp. Rp 197.778.224,00

Rp. Rp 42.820.458,00

Rp. Rp 119.968.800,00

Hp. Rp 34.988.966,00

Tanah Laut, 23 September 2024

Pihak Kedua

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



**ACHMAD TAUFIKS.Pd, MAP
NIP. 197102241997021003**

Pihak Pertama

**KEPALA BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
JASAJUSAHA**



**SURIANSYAH.SOS
NIP. 196703061992031006**



**PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON III
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHANTAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DANITA PUSPAWARDANI S.STP, M.Si**
Jabatan : **KEPALA BIDANG DATA, INFORMASI DAN PENGADUAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ACHMAD TAUFIK S.Pd, MAP**
Jabatan : **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

ACHMAD TAUFIK S.Pd, MAP
NIP. 197102241997021003

Tanah Laut, 23 September 2024
Pihak Pertama
**KEPALA BIDANG DATA, INFORMASI DAN
PENGADUAN**

DANITA PUSPAWARDANI S.STP, M.Si
2003
NIP. 19820822200012

PERINJIAN KINERJA
PIAHAT ESTIMON III
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD MURNI TAHUN 2024

SO	SASARAN PROGRAM / PROGRAM / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan dan non perizinan		
	1 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		
	2 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Persen	100
2	Tervalidasinya data dan informasi Pelayanan perizinan dan non perizinan		
	2 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		
	1 Presentase data dan informasi yang valid	Dokumen	4

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
2.10.04. Program PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp. Rp 197.770.210,00
2.18.04.2.01. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. Rp 197.778.210,00
2.18.04.2.01.08. Sub Kegiatan Pemanfaatan Analisis dan Laporan di bidang perizinan berbasis risiko	Rp. Rp 48.201.500,00
2.18.04.2.01.06. Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Rp. Rp 119.968.800,00
2.18.04.2.01.03. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Rp. Rp 34.988.966,00
2.18.06. Program PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Rp. Rp 190.181.992,00
2.18.62.01. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. Rp 190.181.992,00
2.18.06.2.01.01. Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp. Rp 190.181.992,00

Pihak Kedua
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

ACHMAD TAUFIK S.Pd, **MAP**
 NIP. 197102241997021003

Tanah Laut, 23 September 2024
 Pihak Pertama
**KEPAU. BIDANG DATA, INFORMASI DAN
 PENGADUAN**


DANITA PUSPAWARDA,MSi
 NIP. 198208222000122003



**PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT SUB KOORDINATOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SHELVEY NURMULIAWATI SE, M.M.**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **IRMA ROSANTI S.Sos.,M.I.Kom.**
Jabatan : **SEKRETARIS**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

IRMA ROSANTI S.Sos.,M.I.Kom.
NIP. 197302252006042006

Tanah Laut, 23 September 2024

Pihak Pertama
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN

SHELVEY NURMULIAWATI SE, M.M.
NIP. 198507082010012019

PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT SUB KOORDINATOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024

NO	SASARAN / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
1	Meningkatnya Ketaatan Penyusunan Dokumen			Rp 9.992.486,00
	1 Kegiatan : 2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	1 Persentase Dokumen Perencanaan yang tersusun tepat waktu	persen	100	

NO	SASARAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
1	Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			Rp 4.999.388,00
	1 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
	1 Jumlah Dokumen Perencanaan	dokumen	4	
2	Terlaksananya Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Rp 4.993.098,00
	2 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	1 Jumlah laporan hasil monev	dokumen	5	

Pihak Kedua

IRMA ROSANTI S.Sos.,M.I.Kom.
NIP. 197302252006042006

Tanah Laut, 23 September 2024

Pihak Pertama

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN

SHELVY NURMULIAWATI SE, M.M.
NIP. 198507082010012019



**PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT SUB KOORDINATOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hamid Arip, A.Md**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **IRMA ROSANTI S.Sos.,M.I.Kom.**
Jabatan : **SEKRETARIS**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanah Laut, 23 September 2024

KEPALA  UANGAN

IRMA ROSANTI S.Sos.,M.I.Kom.
NIP. 197302252006042006

Hamid Arip, A.Md
NIP. 197402222009011001

**PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT SUB KOORDINATOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024**

NO	SASARAN / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
1	Meningkatnya Kualitas Dokumen pelaporan Lingkup Perangkat Daerah			Rp 3.539.509.210,00
	1	Kegiatan : 2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	1	Persentase Dokumen Pelaporan Lingkup Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	persen	

NO	SASARAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
1	Terlaksananya penyusunan pelaporan kinerja Lingkup Perangkat Daerah			Rp 3.534.603.856,00
	1	Sub Kegiatan : 2.18.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
	1	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	
2	Terlaksananya penyusunan pelaporan kinerja Lingkup Perangkat Daerah			Rp 4.905.354,00
	2	Sub Kegiatan : 2.18.01.2.02.03 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
	1	Jumlah Data Laporan Kinerja yang disusun	Dokumen	

Pihak Kedua
SEKRETARIS



IRMA ROSANTI S.Sos.,M.I.Kom.
NIP. 197302252006042006

Tanah Laut, 23 September 2024

Pihak Pertama
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN



Hamid Arip, A.Md
NIP. 197402222009011001



**PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT SUB KOORDINATOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **LASMIATI S.Tr**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **IRMA ROSANTI S.Sos.,M.I.Kom.**
Jabatan : **SEKRETARIS**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
SEKRETARIS

IRMA ROSANTI S.Sos.,M.I.Kom.
NIP. 197302252006042006

Tanah Laut, 23 September 2024
Pihak Pertama
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

LASMIATI S.Tr
NIP. 198604122010012001

**PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT SUB KOORDINATOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024**

NO	SASARAN / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
1	Meningkatnya kualitas layanan Kepegawaian Perangkat Daerah			Rp 279.000.000,00
	1 Kegiatan : 2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	1 persentase ASN yang terlayani kepegawaiannya dengan baik	100	100	
2	Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP			Rp 2.796.795.745,89
	2 Kegiatan : 2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	1 persentase rekomendasi hasil evaluasi AKIP yang ditindaklanjuti	100	100	
	2 persentase rekomendasi hasil evaluasi ZI yang ditindaklanjuti	100	100	
	3 Persentase layanan administrasi umum sesuai SOP	persen	100	
3	Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang kinerja Perangkat Daerah			Rp 755.734.093,30
	3 Kegiatan : 2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	1 persentase aset dalam kondisi baik	100	100	
4	Terpenuhinya layanan administrasi umum perkantoran			Rp 547.987.909,00
	4 Kegiatan : 2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	1 persentase layanan administrasi umum sesuai SOP	persen	100	
5	Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang kinerja Perangkat Daerah			Rp 192.904.500,00
	5 Kegiatan : 2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	1 persentase aset dalam kondisi baik	100	100	

NO	SASARAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
1	Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM Pegawai Perangkat Daerah			Rp 279.000.000,00
	1 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
	1 Jumlah ASN yang mengikuti diklat	orang	30	
2	terlaksananya koordinasi tindak lanjut rekomendasi SAKIP PD			Rp 749.807.048,00
	2 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
	1 jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	laporan	12	
3	Terlaksananya layanan urusan rumah tangga perangkat daerah			Rp 19.618.918,00
	3 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
	1 Jumlah urusan rumah tangga yang diselesaikan sesuai SOP	paket	11	

NO	SASARAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
4	Terlaksananya layanan urusan rumah tangga perangkat daerah			Rp 742.997.739,20
	4 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
	1 Jumlah urusan rumah tangga yang diselesaikan sesuai SOP	paket	50	
5	Terlaksananya layanan urusan rumah tangga perangkat daerah			Rp 941.398.808,69
	5 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.03 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
	1 Jumlah urusan rumah tangga yang diselesaikan sesuai SOP	paket	2	
6	Terlaksananya layanan urusan rumah tangga perangkat daerah			Rp 39.952.913,00
	6 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
	1 Jumlah urusan rumah tangga yang diselesaikan sesuai SOP	paket	2	
7	Terlaksananya layanan urusan rumah tangga perangkat daerah			Rp 250.093.015,00
	7 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.07 - Penyediaan Bahan/Material			
	1 Jumlah urusan rumah tangga yang diselesaikan sesuai SOP	paket	2	
8	Terlaksananya layanan urusan rumah tangga perangkat daerah			Rp 2.927.304,00
	8 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.10 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
	1 Jumlah urusan rumah tangga yang diselesaikan sesuai SOP	Dokumen	1	
9	Terlaksananya layanan urusan rumah tangga perangkat daerah			Rp 50.000.000,00
	9 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.11 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
	1 Jumlah urusan rumah tangga yang diselesaikan sesuai SOP	Dokumen	2	
10	Terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan aset			Rp 300.954.223,00
	10 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.07.11 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
	1 Jumlah sarpras yang disediakan	unit	2	
11	Terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan aset			Rp 454.779.870,00
	11 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.07.02 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
	1 Jumlah sarpras yang disediakan	unit	4	
12	Terlaksananya layanan administrasi persuratan			Rp 148.120.000,00
	12 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
	1 Jumlah urusan rumah yang diselesaikan sesuai SOP	laporan	12	
13	Terlaksananya layanan administrasi persuratan			Rp 399.867.909,00
	13 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
	1 Jumlah urusan rumah tangga yang diselesaikan sesuai SOP	laporan	12	
14	Terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan aset			Rp 153.000.000,00
	14 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
	1 Jumlah sarpras yang dipelihara	unit	15	
15	Terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan aset			Rp 39.904.500,00
	15 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
	1 Jumlah sarpras yang dipelihara	unit	8	

NO	SASARAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
16	Terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan aset			Rp 0,00
	16	Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.10 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
	1	Jumlah sarpras yang dipelihara	unit	

Tanah Laut, 23 September 2024

Pihak Kedua
SEKRETARIS

Pihak Pertama
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN



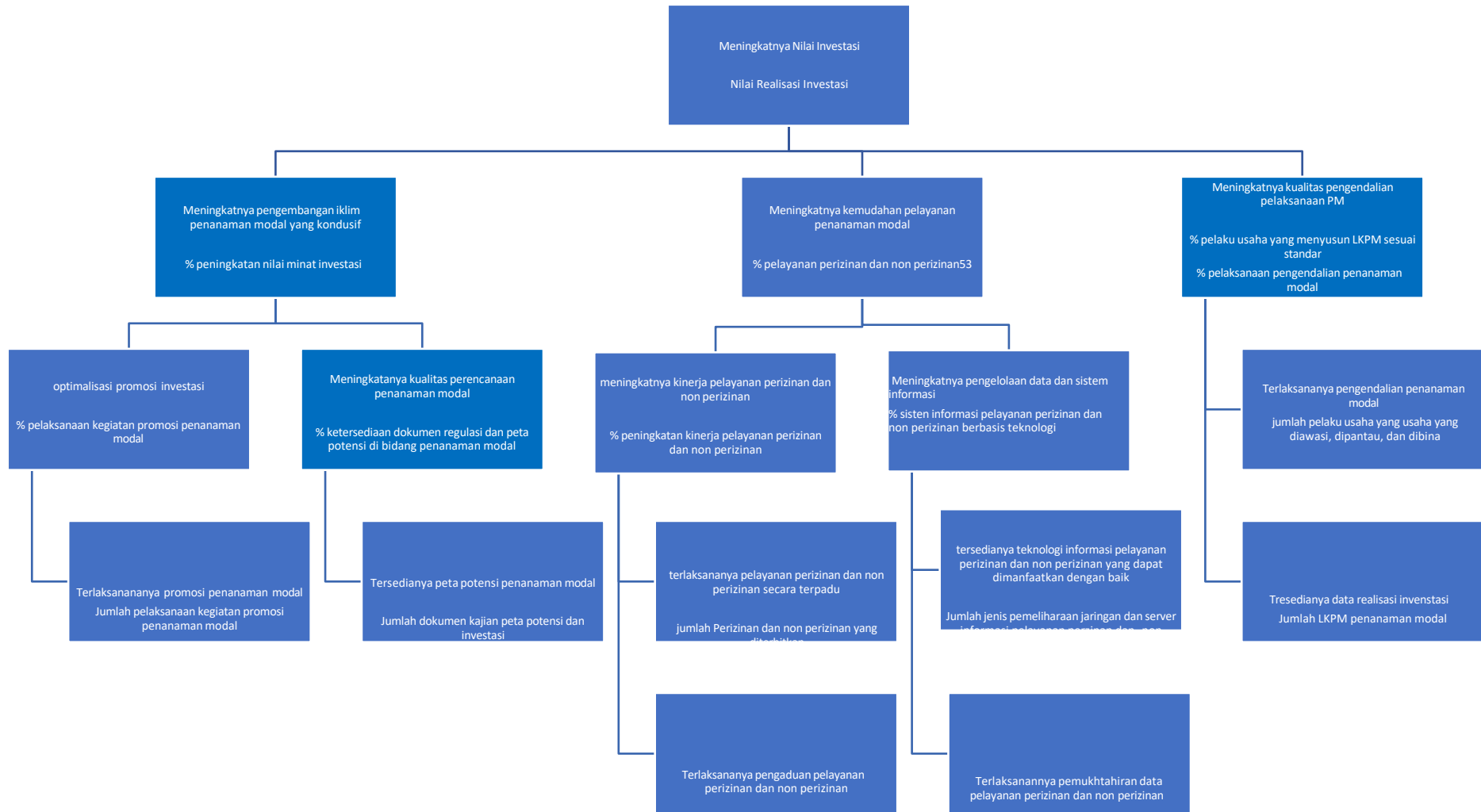
IRMA ROSANTI S.Sos.,M.I.Kom.
NIP. 197302252006042006

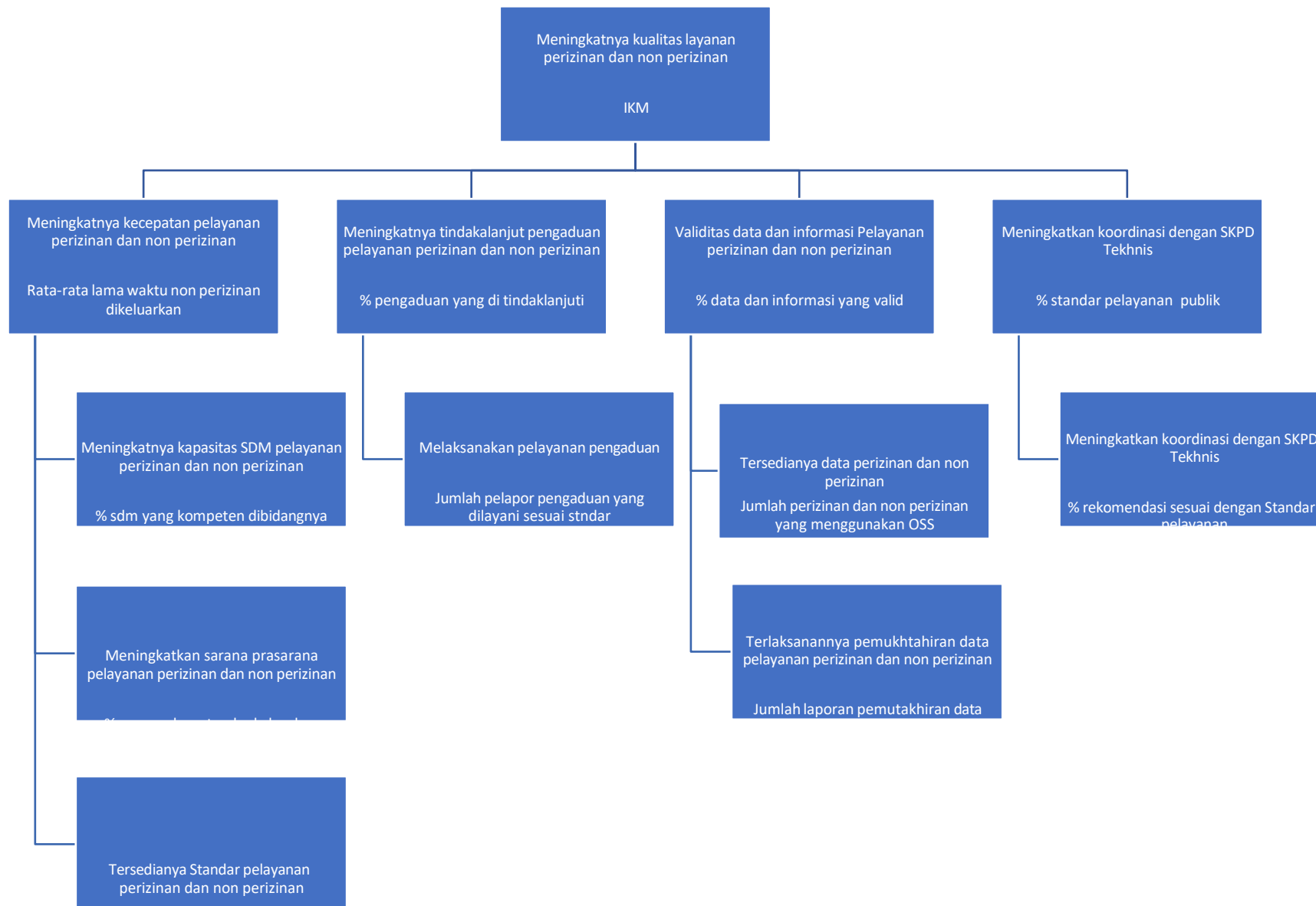


LASMIATI S.Tr
NIP. 198604122010012001

POHON KINERJA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU





LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN
Tahun Anggaran 2024
TRIWULAN I
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw I		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.410.523.462,00	8.121.923.944,00	92,21%	5.911.184.620,00	15,31%		1.502.437.958,00	23,44%		
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.992.486,00	9.992.486,00	100,00%	9.992.486,00	11,96%		1.195.000,00	11,96%		
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.999.388,00	4.999.388,00	100,00%	4.999.388,00	15,90%	0,01%	795.000,00	15,90%	Tidak Ada	
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.993.098,00	4.993.098,00	100,00%	4.993.098,00	8,01%	0,01%	400.000,00	8,01%	Tidak Ada	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.384.509.210,00	3.539.509.210,00	99,92%	3.381.803.907,00	8,01%		792.352.246,00	23,41%		
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.379.603.856,00	3.534.603.856,00	100,00%	3.379.603.856,00	8,01%	3,57%	791.812.246,00	23,43%	Tidak Ada	
2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.905.354,00	4.905.354,00	44,85%	2.200.051,00	11,00%	0,01%	540.000,00	11,01%	Tidak Ada	
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	96.000.000,00	279.000.000,00	100,00%	96.000.000,00	95,83%		92.000.000,00	95,83%		
2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	96.000.000,00	279.000.000,00	100,00%	96.000.000,00	95,83%	1,21%	92.000.000,00	95,83%	Tidak Ada	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.308.343.125,00	2.796.795.746,00	89,11%	1.165.828.681,00	14,83%		193.963.262,00	14,83%		
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.312.570,00	19.618.918,00	78,16%	14.313.104,00	12,24%	0,03%	2.240.807,00	12,24%	Tidak Ada	
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	342.113.674,00	742.997.739,00	92,69%	317.105.164,00	0,52%	0,02%	1.775.538,00	0,52%	Tidak Ada	
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	464.286.664,00	941.398.809,00	99,35%	461.268.800,00	2,05%	0,13%	9.518.214,00	2,05%	Tidak Ada	
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	39.952.913,00	39.952.913,00	49,94%	19.952.484,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
2.18.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	15.000.000,00	250.093.015,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	375.750.000,00	749.807.048,00	79,91%	300.261.825,00	48,02%	2,38%	180.428.703,00	48,02%	Tidak Ada	
2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.927.304,00	2.927.304,00	100,00%	2.927.304,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
2.18.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%	50.000.000,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	569.290.321,00	755.734.093,00	100,00%	569.290.321,00	57,77%		328.900.000,00	57,77%		
2.18.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	454.779.870,00	454.779.870,00	100,00%	454.779.870,00	72,32%	4,34%	328.900.000,00	72,32%	Tidak Ada	
2.18.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	114.510.451,00	300.954.223,00	100,00%	114.510.451,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	537.396.220,00	547.987.909,00	51,52%	276.856.290,00	14,95%		80.382.250,00	14,96%		
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	118.120.000,00	148.120.000,00	54,28%	64.115.536,00	15,50%	0,24%	18.312.570,00	15,50%	Tidak Ada	
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	419.276.220,00	399.867.909,00	50,74%	212.740.754,00	14,80%	0,82%	62.069.680,00	14,80%	Tidak Ada	

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw I		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	504.992.100,00	192.904.500,00	81,47%	411.412.935,00	2,70%		13.645.200,00	2,70%		
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	153.000.000,00	153.000.000,00	43,79%	66.998.700,00	8,92%	0,18%	13.645.200,00	8,92%	Tidak Ada	
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.904.500,00	39.904.500,00	81,01%	32.326.635,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	312.087.600,00	0,00	100,00%	312.087.600,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	39.948.275,00	39.948.275,00	100,00%	39.948.275,00	0,00%		0,00	0,00%		
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	39.948.275,00	39.948.275,00	100,00%	39.948.275,00	0,00%		0,00	0,00%		
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	39.948.275,00	39.948.275,00	100,00%	39.948.275,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	449.999.429,00	532.621.740,00	100,00%	449.999.429,00	0,60%		2.680.000,00	0,60%		
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	449.999.429,00	532.621.740,00	100,00%	449.999.429,00	0,60%		2.680.000,00	0,60%		
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	449.999.429,00	532.621.740,00	100,00%	449.999.429,00	0,60%	0,04%	2.680.000,00	0,60%	Tidak Ada	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	197.778.224,00	197.778.224,00	57,36%	113.441.922,00	20,71%		41.235.000,00	20,85%		
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	197.778.224,00	197.778.224,00	57,36%	113.441.922,00	20,71%		41.235.000,00	20,85%		
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	119.968.800,00	119.968.800,00	56,39%	67.650.406,00	12,62%	0,20%	15.135.000,00	12,62%	Tidak Ada	
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	34.988.966,00	34.988.966,00	48,07%	16.819.195,00	3,57%	0,02%	1.530.000,00	4,37%	Tidak Ada	
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	42.820.458,00	42.820.458,00	67,66%	28.972.321,00	57,38%	0,32%	24.570.000,00	57,38%	Tidak Ada	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	288.780.990,00	288.780.990,00	25,00%	72.195.249,00	10,98%		31.726.200,00	10,99%		
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	288.780.990,00	288.780.990,00	25,00%	72.195.249,00	10,98%		31.726.200,00	10,99%		
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	43.316.498,00	43.316.498,00	25,00%	10.829.126,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	158.830.980,00	158.830.980,00	25,00%	39.707.745,00	14,99%	0,31%	23.816.200,00	14,99%	Tidak Ada	
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	86.633.512,00	86.633.512,00	25,00%	21.658.378,00	9,13%	0,10%	7.910.000,00	9,13%	Tidak Ada	

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw I		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	190.181.992,00	190.181.992,00	83,00%	157.851.053,00	40,65%		77.300.000,00	40,65%		
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	190.181.992,00	190.181.992,00	83,00%	157.851.053,00	40,65%		77.300.000,00	40,65%		
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	190.181.992,00	190.181.992,00	83,00%	157.851.053,00	40,65%	1,02%	77.300.000,00	40,65%	Tidak Ada	
		7.577.212.372	9.371.235.165	89,01%	6.744.620.548		14,97%	1.655.379.158	21,85%		

LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN
Tahun Anggaran 2024
TRIWULAN II
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw II		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.410.523.462,00	8.121.923.944,00	94,77%	6.075.387.665,00	52,26%		3.346.558.654,00	52,20%		
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.992.486,00	9.992.486,00	100,00%	9.992.486,00	43,72%		4.368.800,00	43,72%		
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.999.388,00	4.999.388,00	100,00%	4.999.388,00	54,40%	0,04%	2.719.900,00	54,40%	Tidak Ada	
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.993.098,00	4.993.098,00	100,00%	4.993.098,00	33,02%	0,02%	1.648.900,00	33,02%	Tidak Ada	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.384.509.210,00	3.539.509.210,00	99,96%	3.383.003.756,00	49,83%		1.687.166.530,00	49,85%		
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.379.603.856,00	3.534.603.856,00	100,00%	3.379.603.856,00	49,88%	22,25%	1.685.727.115,00	49,88%	Tidak Ada	
2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.905.354,00	4.905.354,00	69,31%	3.399.900,00	18,34%	0,01%	1.439.415,00	29,34%	Tidak Ada	
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	96.000.000,00	279.000.000,00	100,00%	96.000.000,00	100,00%		92.000.000,00	95,83%		
2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	96.000.000,00	279.000.000,00	100,00%	96.000.000,00	100,00%	1,27%	92.000.000,00	95,83%	Tidak Ada	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.308.343.125,00	2.796.795.746,00	96,98%	1.268.833.337,00	66,65%		871.996.260,00	66,65%		
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.312.570,00	19.618.918,00	78,16%	14.313.104,00	28,39%	0,07%	5.198.722,00	28,39%	Tidak Ada	
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	342.113.674,00	742.997.739,00	97,51%	333.595.043,00	67,48%	3,05%	230.874.224,00	67,48%	Tidak Ada	
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	464.286.664,00	941.398.809,00	100,00%	464.286.663,00	79,06%	4,84%	367.051.929,00	79,06%	Tidak Ada	
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	39.952.913,00	39.952.913,00	74,97%	29.952.698,00	7,97%	0,04%	3.183.405,00	7,97%	Tidak Ada	
2.18.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	15.000.000,00	250.093.015,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	375.750.000,00	749.807.048,00	99,47%	373.758.525,00	70,71%	3,51%	265.687.980,00	70,71%	Tidak Ada	
2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.927.304,00	2.927.304,00	100,00%	2.927.304,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
2.18.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%	50.000.000,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	569.290.321,00	755.734.093,00	100,00%	569.290.321,00	72,40%		412.155.588,00	72,40%		
2.18.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	454.779.870,00	454.779.870,00	100,00%	454.779.870,00	85,13%	5,11%	387.157.000,00	85,13%	Tidak Ada	
2.18.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	114.510.451,00	300.954.223,00	100,00%	114.510.451,00	21,83%	0,33%	24.998.588,00	21,83%	Tidak Ada	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	537.396.220,00	547.987.909,00	54,31%	291.857.530,00	41,40%		222.450.826,00	41,39%		
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	118.120.000,00	148.120.000,00	66,98%	79.116.776,00	30,52%	0,48%	36.054.682,00	30,52%	Tidak Ada	
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	419.276.220,00	399.867.909,00	50,74%	212.740.754,00	44,46%	2,46%	186.396.144,00	44,46%	Tidak Ada	

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw II		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	504.992.100,00	192.904.500,00	90,38%	456.410.235,00	11,17%		56.420.650,00	11,17%		
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	153.000.000,00	153.000.000,00	73,20%	111.996.000,00	32,01%	0,65%	48.970.650,00	32,01%	Tidak Ada	
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.904.500,00	39.904.500,00	81,01%	32.326.635,00	18,67%	0,10%	7.450.000,00	18,67%	Tidak Ada	
2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	312.087.600,00	0,00	100,00%	312.087.600,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	39.948.275,00	39.948.275,00	100,00%	39.948.275,00	0,00%		0,00	0,00%		
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	39.948.275,00	39.948.275,00	100,00%	39.948.275,00	0,00%		0,00	0,00%		
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	39.948.275,00	39.948.275,00	100,00%	39.948.275,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	449.999.429,00	532.621.740,00	100,00%	449.999.429,00	30,17%		160.694.332,00	35,71%		
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	449.999.429,00	532.621.740,00	100,00%	449.999.429,00	30,17%		160.694.332,00	35,71%		
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	449.999.429,00	532.621.740,00	100,00%	449.999.429,00	30,17%	1,79%	160.694.332,00	35,71%	Tidak Ada	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	197.778.224,00	197.778.224,00	90,59%	179.171.955,00	46,01%		91.000.000,00	46,01%		
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	197.778.224,00	197.778.224,00	90,59%	179.171.955,00	46,01%		91.000.000,00	46,01%		
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	119.968.800,00	119.968.800,00	100,00%	119.968.799,00	47,51%	0,75%	57.000.000,00	47,51%	Tidak Ada	
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	34.988.966,00	34.988.966,00	66,11%	23.131.204,00	16,01%	0,07%	5.600.000,00	16,01%	Tidak Ada	
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	42.820.458,00	42.820.458,00	84,24%	36.071.952,00	66,32%	0,37%	28.400.000,00	66,32%	Tidak Ada	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	288.780.990,00	288.780.990,00	50,00%	144.390.496,00	44,80%		129.360.400,00	44,80%		
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	288.780.990,00	288.780.990,00	50,00%	144.390.496,00	44,80%		129.360.400,00	44,80%		
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	43.316.498,00	43.316.498,00	50,00%	21.658.250,00	27,31%	0,16%	11.830.000,00	27,31%	Tidak Ada	
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	158.830.980,00	158.830.980,00	50,00%	79.415.490,00	63,08%	1,32%	100.185.400,00	63,08%	Tidak Ada	
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	86.633.512,00	86.633.512,00	50,00%	43.316.756,00	20,02%	0,23%	17.345.000,00	20,02%	Tidak Ada	

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw II		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	190.181.992,00	190.181.992,00	91,72%	174.434.922,00	68,25%		129.796.450,00	68,25%		
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	190.181.992,00	190.181.992,00	91,72%	174.434.922,00	68,25%		129.796.450,00	68,25%		
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	190.181.992,00	190.181.992,00	91,72%	174.434.922,00	68,25%	1,71%	129.796.450,00	68,25%	Tidak Ada	
		7.577.212.372	9.371.235.165	93,22%	7.063.332.742		50,63%	3.857.409.836	50,91%		

LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN
Tahun Anggaran 2024
TRIWULAN III
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw III		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.410.523.462,00	8.121.923.944,00	99,99%	6.410.183.640,00	56,80%		3.636.983.244,00	56,73%		
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.992.486,00	9.992.486,00	100,00%	9.992.486,00	43,72%		4.368.800,00	43,72%		
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.999.388,00	4.999.388,00	100,00%	4.999.388,00	54,40%	0,04%	2.719.900,00	54,40%	Tidak Ada	
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.993.098,00	4.993.098,00	100,00%	4.993.098,00	33,02%	0,02%	1.648.900,00	33,02%	Tidak Ada	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.384.509.210,00	3.539.509.210,00	99,99%	3.384.203.605,00	55,36%		1.873.592.069,00	55,36%		
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.379.603.856,00	3.534.603.856,00	100,00%	3.379.603.856,00	55,40%	24,71%	1.872.152.654,00	55,40%	Tidak Ada	
2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.905.354,00	4.905.354,00	93,77%	4.599.749,00	29,34%	0,02%	1.439.415,00	29,34%	Tidak Ada	
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	96.000.000,00	279.000.000,00	100,00%	96.000.000,00	100,00%		92.000.000,00	95,83%		
2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	96.000.000,00	279.000.000,00	100,00%	96.000.000,00	100,00%	1,27%	92.000.000,00	95,83%	Tidak Ada	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.308.343.125,00	2.796.795.746,00	100,00%	1.308.308.910,00	71,84%		939.927.533,00	71,84%		
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.312.570,00	19.618.918,00	100,00%	18.312.569,00	28,39%	0,07%	5.198.722,00	28,39%	Tidak Ada	
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	342.113.674,00	742.997.739,00	99,99%	342.079.462,00	67,48%	3,05%	230.874.224,00	67,48%	Tidak Ada	
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	464.286.664,00	941.398.809,00	100,00%	464.286.663,00	87,64%	5,37%	406.912.929,00	87,64%	Tidak Ada	
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	39.952.913,00	39.952.913,00	100,00%	39.952.912,00	8,95%	0,05%	3.574.341,00	8,95%	Tidak Ada	
2.18.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	15.000.000,00	250.093.015,00	100,00%	15.000.000,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	375.750.000,00	749.807.048,00	100,00%	375.750.000,00	77,70%	3,85%	291.947.220,00	77,70%	Tidak Ada	
2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.927.304,00	2.927.304,00	100,00%	2.927.304,00	48,51%	0,02%	1.420.097,00	48,51%	Tidak Ada	
2.18.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%	50.000.000,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	569.290.321,00	755.734.093,00	100,00%	569.290.321,00	72,40%		412.155.588,00	72,40%		
2.18.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	454.779.870,00	454.779.870,00	100,00%	454.779.870,00	85,13%	5,11%	387.157.000,00	85,13%	Tidak Ada	
2.18.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	114.510.451,00	300.954.223,00	100,00%	114.510.451,00	21,83%	0,33%	24.998.588,00	21,83%	Tidak Ada	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	537.396.220,00	547.987.909,00	100,00%	537.396.219,00	48,10%		258.518.604,00	48,11%		
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	118.120.000,00	148.120.000,00	100,00%	118.120.000,00	35,80%	0,56%	42.284.092,00	35,80%	Tidak Ada	
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	419.276.220,00	399.867.909,00	100,00%	419.276.219,00	51,57%	2,85%	216.234.512,00	51,57%	Tidak Ada	

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw III		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	504.992.100,00	192.904.500,00	100,00%	504.992.099,00	11,17%		56.420.650,00	11,17%		
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	153.000.000,00	153.000.000,00	100,00%	153.000.000,00	32,01%	0,65%	48.970.650,00	32,01%	Tidak Ada	
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.904.500,00	39.904.500,00	100,00%	39.904.499,00	18,67%	0,10%	7.450.000,00	18,67%	Tidak Ada	
2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	312.087.600,00	0,00	100,00%	312.087.600,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	39.948.275,00	39.948.275,00	100,00%	39.948.275,00	1,02%		408.275,00	1,02%		
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	39.948.275,00	39.948.275,00	100,00%	39.948.275,00	1,02%		408.275,00	1,02%		
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	39.948.275,00	39.948.275,00	100,00%	39.948.275,00	1,02%	0,01%	408.275,00	1,02%	Tidak Ada	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	449.999.429,00	532.621.740,00	100,00%	449.999.429,00	71,92%		538.060.102,00	119,57%		
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	449.999.429,00	532.621.740,00	100,00%	449.999.429,00	71,92%		538.060.102,00	119,57%		
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	449.999.429,00	532.621.740,00	100,00%	449.999.429,00	71,92%	4,27%	538.060.102,00	119,57%	Tidak Ada	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	197.778.224,00	197.778.224,00	100,00%	197.778.219,00	61,02%		120.698.780,00	61,03%		
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	197.778.224,00	197.778.224,00	100,00%	197.778.219,00	61,02%		120.698.780,00	61,03%		
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	119.968.800,00	119.968.800,00	100,00%	119.968.799,00	62,17%	0,98%	74.590.000,00	62,17%	Tidak Ada	
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	34.988.966,00	34.988.966,00	100,00%	34.988.964,00	49,18%	0,23%	17.209.000,00	49,18%	Tidak Ada	
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	42.820.458,00	42.820.458,00	100,00%	42.820.456,00	67,49%	0,38%	28.899.780,00	67,49%	Tidak Ada	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	288.780.990,00	288.780.990,00	75,00%	216.585.743,00	60,79%		175.545.400,00	60,79%		
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	288.780.990,00	288.780.990,00	75,00%	216.585.743,00	60,79%		175.545.400,00	60,79%		
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	43.316.498,00	43.316.498,00	75,00%	32.487.374,00	35,00%	0,20%	15.160.000,00	35,00%	Tidak Ada	
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	158.830.980,00	158.830.980,00	75,00%	119.123.235,00	83,24%	1,74%	132.215.400,00	83,24%	Tidak Ada	
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	86.633.512,00	86.633.512,00	75,00%	64.975.134,00	32,52%	0,37%	28.170.000,00	32,52%	Tidak Ada	

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw III		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	190.181.992,00	190.181.992,00	100,00%	190.181.990,00	75,61%		143.796.450,00	75,61%		
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	190.181.992,00	190.181.992,00	100,00%	190.181.990,00	75,61%		143.796.450,00	75,61%		
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	190.181.992,00	190.181.992,00	100,00%	190.181.990,00	75,61%	1,90%	143.796.450,00	75,61%	Tidak Ada	
		7.577.212.372	9.371.235.165	99,04%	7.504.677.296		58,14%	4.615.492.251	60,91%		

LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN
Tahun Anggaran 2024
TRIWULAN IV
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw IV		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.410.523.462,00	8.121.923.944,00	100,00%	8.121.923.944,00	99,85%		6.762.256.647,00	83,26%		
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.992.486,00	9.992.486,00	100,00%	9.992.486,00	100,00%		7.935.800,00	79,42%		
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.999.388,00	4.999.388,00	100,00%	4.999.388,00	100,00%	0,05%	3.991.900,00	79,85%	Tidak Ada	
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.993.098,00	4.993.098,00	100,00%	4.993.098,00	100,00%	0,05%	3.943.900,00	78,99%	Tidak Ada	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.384.509.210,00	3.539.509.210,00	100,00%	3.539.509.210,00	100,00%		2.977.441.913,00	84,12%		
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.379.603.856,00	3.534.603.856,00	100,00%	3.534.603.856,00	100,00%	37,72%	2.973.555.498,00	84,13%	Tidak Ada	
2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.905.354,00	4.905.354,00	100,00%	4.905.354,00	100,00%	0,05%	3.886.415,00	79,23%	Tidak Ada	
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	96.000.000,00	279.000.000,00	100,00%	279.000.000,00	100,00%		266.000.000,00	95,34%		
2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	96.000.000,00	279.000.000,00	100,00%	279.000.000,00	100,00%	2,98%	266.000.000,00	95,34%	Tidak Ada	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.308.343.125,00	2.796.795.746,00	100,00%	2.796.795.746,00	99,55%		2.241.106.459,00	80,13%		
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.312.570,00	19.618.918,00	100,00%	19.618.918,00	100,00%	0,21%	17.384.359,00	88,61%	Tidak Ada	
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	342.113.674,00	742.997.739,00	100,00%	742.997.739,00	100,00%	7,93%	667.538.642,00	89,84%	Tidak Ada	
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	464.286.664,00	941.398.809,00	100,00%	941.398.809,00	100,00%	10,05%	799.911.516,00	84,97%	Tidak Ada	
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	39.952.913,00	39.952.913,00	100,00%	39.952.913,00	100,00%	0,43%	31.429.800,00	78,67%	Tidak Ada	
2.18.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	15.000.000,00	250.093.015,00	100,00%	250.093.015,00	95,00%	2,54%	15.000.000,00	6,00%	Tidak Ada	
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	375.750.000,00	749.807.048,00	100,00%	749.807.048,00	100,00%	8,00%	664.440.336,00	88,61%	Tidak Ada	
2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.927.304,00	2.927.304,00	100,00%	2.927.304,00	100,00%	0,03%	2.681.806,00	91,61%	Tidak Ada	
2.18.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%	50.000.000,00	100,00%	0,53%	42.720.000,00	85,44%	Tidak Ada	
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	569.290.321,00	755.734.093,00	100,00%	755.734.093,00	100,00%		659.643.588,00	87,29%		
2.18.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	454.779.870,00	454.779.870,00	100,00%	454.779.870,00	100,00%	4,85%	387.157.000,00	85,13%	Tidak Ada	
2.18.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	114.510.451,00	300.954.223,00	100,00%	300.954.223,00	100,00%	3,21%	272.486.588,00	90,54%	Tidak Ada	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	537.396.220,00	547.987.909,00	100,00%	547.987.909,00	100,00%		441.365.746,00	80,54%		
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	118.120.000,00	148.120.000,00	100,00%	148.120.000,00	100,00%	1,58%	74.999.794,00	50,63%	Tidak Ada	
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	419.276.220,00	399.867.909,00	100,00%	399.867.909,00	100,00%	4,27%	366.365.952,00	91,62%	Tidak Ada	

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw IV		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	504.992.100,00	192.904.500,00	100,00%	192.904.500,00	100,00%		168.763.141,00	87,49%		
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	153.000.000,00	153.000.000,00	100,00%	153.000.000,00	100,00%	1,63%	133.816.777,00	87,46%	Tidak Ada	
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.904.500,00	39.904.500,00	100,00%	39.904.500,00	100,00%	0,43%	34.946.364,00	87,57%	Tidak Ada	
2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	312.087.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	39.948.275,00	39.948.275,00	100,00%	39.948.275,00	100,00%		39.276.275,00	98,32%		
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	39.948.275,00	39.948.275,00	100,00%	39.948.275,00	100,00%		39.276.275,00	98,32%		
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	39.948.275,00	39.948.275,00	100,00%	39.948.275,00	100,00%	0,43%	39.276.275,00	98,32%	Tidak Ada	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	449.999.429,00	532.621.740,00	100,00%	532.621.740,00	100,00%		529.882.362,00	99,49%		
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	449.999.429,00	532.621.740,00	100,00%	532.621.740,00	100,00%		529.882.362,00	99,49%		
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	449.999.429,00	532.621.740,00	100,00%	532.621.740,00	100,00%	5,68%	529.882.362,00	99,49%	Tidak Ada	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	197.778.224,00	197.778.224,00	100,00%	197.778.224,00	100,00%		190.937.130,00	96,54%		
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	197.778.224,00	197.778.224,00	100,00%	197.778.224,00	100,00%		190.937.130,00	96,54%		
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	119.968.800,00	119.968.800,00	100,00%	119.968.800,00	100,00%	1,28%	115.620.000,00	96,38%	Tidak Ada	
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	34.988.966,00	34.988.966,00	100,00%	34.988.966,00	100,00%	0,37%	32.637.350,00	93,28%	Tidak Ada	
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	42.820.458,00	42.820.458,00	100,00%	42.820.458,00	100,00%	0,46%	42.679.780,00	99,67%	Tidak Ada	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	288.780.990,00	288.780.990,00	100,00%	288.780.990,00	100,00%		277.856.645,00	96,22%		
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	288.780.990,00	288.780.990,00	100,00%	288.780.990,00	100,00%		277.856.645,00	96,22%		
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	43.316.498,00	43.316.498,00	100,00%	43.316.498,00	100,00%	0,46%	38.706.498,00	89,36%	Tidak Ada	
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	158.830.980,00	158.830.980,00	100,00%	158.830.980,00	100,00%	1,69%	158.346.635,00	99,70%	Tidak Ada	
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	86.633.512,00	86.633.512,00	100,00%	86.633.512,00	100,00%	0,92%	80.803.512,00	93,27%	Tidak Ada	

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw IV		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	190.181.992,00	190.181.992,00	100,00%	190.181.992,00	100,00%		174.521.450,00	91,77%		
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	190.181.992,00	190.181.992,00	100,00%	190.181.992,00	100,00%		174.521.450,00	91,77%		
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	190.181.992,00	190.181.992,00	100,00%	190.181.992,00	100,00%	2,03%	174.521.450,00	91,77%	Tidak Ada	
		7.577.212.372	9.371.235.165	100,00%	9.371.235.165		99,87%	7.974.730.509	85,10%		

**EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR SKPD Sesuai dengan Target Renstra (2024-2026)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian
		2024	2024	2025	2026	2024
1	Nilai Realisasi Investasi	1.568.663,53	1.568.663,53	1.647.096,70	1.729.451,54	1.220.838.150,00
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	90.50	90.50	90.75	91.00	91,224
3	Nilai SAKIP DPMPSTP	70.01	70.01	75.00	80.01	Masih dalam proses

Kepala Dinas Penanaman
Modal dan PTSP
Kabupaten Tanah Laut,



Gentry Yuliyantono, SE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660708 199303 1 002

**MATRIKS KESELARASAN
KESELARASAN KINERJA - OUTPUT - PENGANGGARAN**

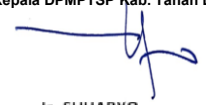
No	Sasaran Strategis	Sasaran Strategis Berorientasi Hasil (Y/T)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis Berkualitas (Y/T)	IKU / Bukan IKU	No	Program			Program Terkait Dengan Sasaran (Y/T)	Kegiatan			Kegiatan Terkait Dengan Sasaran (Y/T)	Anggaran terkait	Ket
							Uraian Program	Sasaran Program	Target Sasaran Program		Uraian Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah		Nilai Realisasi Investasi Daerah		IKU		Program Pengembangan iklim Penanaman	Nilai minat investasi berdasarkan lokasi sektor	25 pelaku usaha		Penyusunan Peta Potensi Investasi	Pelaku usaha	Jumlah dokumen peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota	39.948.275		PM
							Program Promosi Pelayanan Penanaman Modal	Investor yang menanamkan modal	100 investor		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Investor	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	449.999.429		PM
							Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (DAK Non Fisik)	Persentase pelaku usaha yang di bina	100%		Penyelesaian dan hambatan yang di hadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Pelaku usaha	Jumlah penyelesaian permasalahan yang di hadapi pelaku usahanya	43.316.498		PM
											Pengawasan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah di Analisa dan di verifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan; kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	86.633.512		PM
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat terhadap Perizinan dan Non Perizinan		Indeks Kepuasan Masyarakat		IKU		Progran Pelayanan Penanaman Modal	- Jumlah ijin usaha dan non usaha yang di terbitkan - Persentase ijin usaha yang terfasilitasi	-2650 jumlah ijin - 100%		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui system perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	Pelaku usaha	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui system perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	119.968.800		-JU -TT

											Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi perijinan berusaha berbasis risiko	Pelaku usaha	Jumlah Pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan melalui system perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	34.988.966	DIP
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	---	------------	-----

No	Sasaran Strategis	Sasaran Strategis Berorientasi Hasil (Y/T)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis Berkualitas (Y/T)	IKU / Bukan IKU	No	Program			Program Terkait Dengan Sasaran(Y/T)	Kegiatan			Kegiatan Terkait Dengan Sasaran (Y/T)	Anggaran terkait	Ket
							Uraian Program	Sasaran Program	Target Sasaran Program		Uraian Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang berusaha berbasis risiko	Pelaku usaha	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	100.710.000	PM	
							Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Informasi Penanaman Modal	100%		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan informasi perizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Pelaku usaha	Jumlah daya dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang di olah, di kaji dan di manfaatkan	190.181.992	DIP	
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja		Nilai SAKIP DPMPSTP		IKU		Penunjang Irusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kotas	Persentase Capaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Seluruh Bidang di DPMPSTP	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4.999.388	Perencanaan	
											Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Seluruh Bidang di DPMPSTP	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4.993.098	Perencanaan	

No	Sasaran Strategis	Sasaran Strategis Berorientasi Hasil (Y/T)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis Berkualitas (Y/T)	IKU / Bukan IKU	No	Program			Program Terkait Dengan Sasaran (Y/T)	Kegiatan			Kegiatan Terkait Dengan Sasaran (Y/T)	Anggaran terkait	K e t
							Uraian Program	Sasaran Program	Target Sasaran Program		Uraian Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Sub Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Penunjang Irusan Pemerintahan Kabupaten/Kotas Daerah	Persentase Capaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Seluruh Bidang di DPMPPTSP	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN		3.534.603.856	keuangan
											Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Seluruh Bidang di DPMPPTSP	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD		4.905.354	keuangan
											Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Seluruh Bidang di DPMPPTSP	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan		96.000.000	umpeg
											Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Seluruh Bidang di DPMPPTSP	Jumlah paket komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan yang di sediakan		19.618.918	Umpeg
											Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Seluruh Bidang di DPMPPTSP	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan		742.997.739,20	Umpeg
											Penyediaan peralatan rumah tangga	Seluruh Bidang di DPMPPTSP	Jumlah paket peralatan rumah tangga		941.398.808,68	Umpeg
											Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Seluruh Bidang di DPMPPTSP	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan		39.952.918	Umpeg
											Penyediaan bahan/material	Seluruh Bidang di DPMPPTSP	Jumlah paket bahan/material		250.093.018	Umpeg

Pelaihari, 31 Desember 2023
Kepala DPMTSP Kab. Tanah Laut



Ir. SUHARYO
NIP. 19640502 198703 1 020
